



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI, DEWAN
KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN PENERAPAN PSAK 50/55
(REVISI 2006) TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA INDUSTRI
PERBANKAN**

SKRIPSI

**NAUFAL ARIEF RAHADIANTO
1006813866**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI,
DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN PENERAPAN
PSAK 50/55 (REVISI 2006) TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA
INDUSTRI PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi**

**NAUFAL ARIEF RAHADIANTO
1006813866**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI
JURUSAN AKUNTANSI
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Naufal Arief Rahadianto

NPM : 1006813866

Tanda Tangan : 



Tanggal : 12 Juli 2012

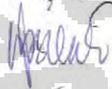
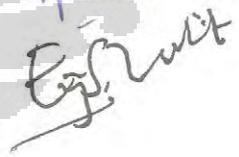
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Naufal Arief Rahadiano
NPM : 1006813866
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul Skripsi :
*) Indonesia : Analisis Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) Terhadap *Audit Delay* pada Industri Perbankan
*) Inggris : Analysis Effect of The Auditor Specialization Industry, Board of Commissioners, The Audit Committee, and Application of PSAK 50/55 (Revised 2006) on Audit Delay in Banking Industry

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi untuk Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Pembimbing : Viska Anggraita S.E., M.Ak	()
Penguji : Wasilah S.E., Ak., M.E	()
Penguji : Evony Silvino Violita S.E., Ak., M.Com	()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi

SRI NURHAYATI, M.M., S.A.S
NIP : 196003171986022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Ibu Viska Aggraita SE., M.Ak, sebagai dosen pembimbing saya, yang telah member bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta mendukung saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 2) Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman selama masa kuliah.
- 3) Ibu Purwatiningsih SE., Ak, MBA, DEA yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya dan teman-teman seperjuangan untuk bisa mengerjakan skripsi ini di kediamannya, hal ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman karena mendapatkan kesempatan khusus dari beliau.
- 4) Kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
- 5) Teman-teman tercinta ayu, tia, mekel, adys, jose, phili, pitsy, abraham, didit, rei, wilda, mita, resti, dina, tian, made, aca, dinda, dewi, imey terimakasih untuk kebersamaannya selama kuliah dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi. Teman-teman satu angkatan di program ekstensi

akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.

- 6) Teman-teman SMA randy, rudy, ican, fajar, arif, alan, dito, made yang selalu menghibur saya ditengah kepenatan skripsi.
- 7) Raisa Andriana (@raisa6690) yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dengan suaranya yang merdu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 12 Juli 2012

Penulis,

(Naufal Arief Rahadianto)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Arief Rahadianto
NPM : 1006813866
Program Studi : Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PENGARUH AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI, DEWAN
KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN PENERAPAN PSAK 50/55 (REVISI
2006) TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA INDUSTRI PERBANKAN**

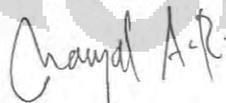
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan



(Naufal Arief Rahadianto)

ABSTRAK

Nama : Naufal Arief Rahadianto
Program Studi : Ekstensi
Judul : ANALISIS PENGARUH AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN PENERAPAN PSAK 50/55 (REVISI 2006) TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA INDUSTRI PERBANKAN

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh dari auditor spesialisasi industri, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay* pada industri perbankan yang terdapat di Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Penelitian ini juga meneliti apakah dewan komisaris dan komite audit memoderasi hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*, serta meneliti apakah auditor spesialisasi industri, komite audit, dan dewan komisaris memoderasi hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay*. *Audit delay* merupakan salah satu ukuran yang menggambarkan efisiensi audit dan kualitas laba (*timeliness*). Auditor spesialisasi industri dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Dewan komisaris dan komite audit tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh negatif hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*. Kemudian auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, dan komite audit tidak terbukti dapat memperlemah pengaruh positif hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay*.

Kata kunci:

Audit Delay, Auditor Spesialisasi Industri, Komite Audit, Dewan Komisaris, *Corporate Governance*, PSAK 50/55 (revisi 2006)

ABSTRACT

Name : Naufal Arief Rahadianto
Study Program : *Extention*
Title : *ANALYSIS EFFECT OF THE AUDITOR SPECIALIZATION INDUSTRY, BOARD OF COMMISSIONERS, THE AUDIT COMMITTEE, AND APPLICATION OF PSAK 50/55 (REVISED 2006) ON AUDIT DELAY IN BANKING INDUSTRY*

The study was conducted to examine the effect of auditor industry specialization, the effectiveness of the board of directors, audit committee effectiveness, and the application of PSAK 50/55 (revised 2006) on audit delay in the banking industry from 2009 until 2010. The study also examined whether the board and audit committee moderates the relationship between auditor specialization industry and audit delay, and examine whether auditor specialization industry, audit committee and board of commissioners moderates the relationship between the application of PSAK 50/55 (revised 2006) and audit delay. Audit delay is describing the efficiency of audit and earnings quality (timeliness). Auditor specialization industry and the application of PSAK 50/55 (revised 2006) has a positive effect on audit delay. While the board and audit committee has a negative influence on audit delay. Board and audit committee are not shown to amplify the negative effect of relationship between auditor specialization industry and audit delay. Then auditor specialization industry, board of commissioners, and the audit committee has not been proven to weaken the positive effect of the relationship between the application of PSAK 50/55 (revised 2006) and audit delay.

Key words:

Audit Delay, Auditor Specialization Industry, Audit Committee, Board of Commissioners, Corporate Governance, PSAK 50/55 (revised 2006)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Laporan Keuangan	11
2.2 Laporan Audit	12
2.3 Standar Pengauditan	13
2.4 Bank di Indonesia	14
2.4.1 Bank dan Perbankan	14
2.4.2 Klasifikasi Bank	16
2.4.3 Laporan Keuangan Bank Umum Konvensional	18

2.5	Ketepatan Waktu dan Regulasi	19
2.6	<i>Audit Delay</i>	21
2.7	Auditor Spesialisasi Industri dan <i>Audit Delay</i>	22
2.8	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Audit Delay</i>	23
2.9	Implementasi IFRS Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) dan <i>Audit Delay</i>	25
2.10	Kerangka Pemikiran	27
2.11	Pengembangan Hipotesis	30
2.11.1	Auditor Spesialisasi Industri dan <i>Audit Delay</i>	30
2.11.2	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Audit Delay</i>	31
2.11.3	Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan <i>Audit Delay</i>	32
2.11.4	Pengaruh Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Hubungan Auditor Spesialisasi Industri dengan <i>Audit Delay</i>	33
2.11.5	Pengaruh Moderasi Auditor Spesialisasi Industri terhadap Hubungan Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan <i>Audit Delay</i>	34
2.11.6	Pengaruh Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Hubungan Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan <i>Audit Delay</i>	35
3.	METODE PENELITIAN	36
3.1	Populasi dan sampel	36
3.2	Jenis dan Sumber Data	36
3.3	Model Penelitian	37
3.4	Operasionalisasi Variabel	40
3.4.1	<i>Audit Delay</i>	40
3.4.2	Variabel Bebas Utama	40
3.4.3	Variabel Kontrol	42
3.5	Metode Analisis Data	45

3.5.1	Analisis Regresi Linear Berganda	48
3.5.2	Uji Hipotesis	48
4.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	52
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	52
4.2	Statistik Deskriptif Hasil Skor Efektifitas Dewan Komisararis	54
4.3	Statistik Deskriptif Hasil Skor Efektifitas Komite Audit	55
4.4	Uji Reliabilitas	57
4.5	Statistik Deskriptif Seluruh Variabel	57
4.6	Uji Korelasi Bivariate	61
4.7	Hasil Pengujian Asumsi Klasik	63
4.8	Hasil Pengujian Hipotesis	70
4.8.1	Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisararis, Komite Audit dan <i>Audit Delay</i>	71
4.8.1.1	Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisararis, dan Komite Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	72
4.8.1.2	Variabel Kontrol	75
4.8.2	Pengaruh Moderasi Dewan Komisararis dan Komite Audit Terhadap Hubungannya Auditor Spesialisasi Industri dengan <i>Audit Delay</i>	76
4.8.3	Pengaruh Moderasi Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisararis, dan Komite Audit terhadap Hubungannya Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) dengan <i>Audit Delay</i>	77
4.9	Uji Sensitivitas	80
4.9.1	Hasil Regresi Uji Sensitivitas	81
5.	PENUTUP	85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran	87

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kriteria Skor Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit
- Lampiran 2 Statistik Deskriptif
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS 16.0 Model 1 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS 16.0 Model 2 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)
- Lampiran 5 Hasil Output SPSS 16.0 Model 3 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)
- Lampiran 6 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 1
- Lampiran 7 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 2
- Lampiran 8 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 3
- Lampiran 9 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Model 1
- Lampiran 10 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Model 2
- Lampiran 11 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Model 3
- Lampiran 12 Hasil Output SPSS 16.0 *Pearson Correlation*
- Lampiran 13 Daftar Bank Sampel
- Lampiran 14 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Uji Sensitivitas Model 1
- Lampiran 15 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitivitas Model 1
- Lampiran 16 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitivitas Model 1 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

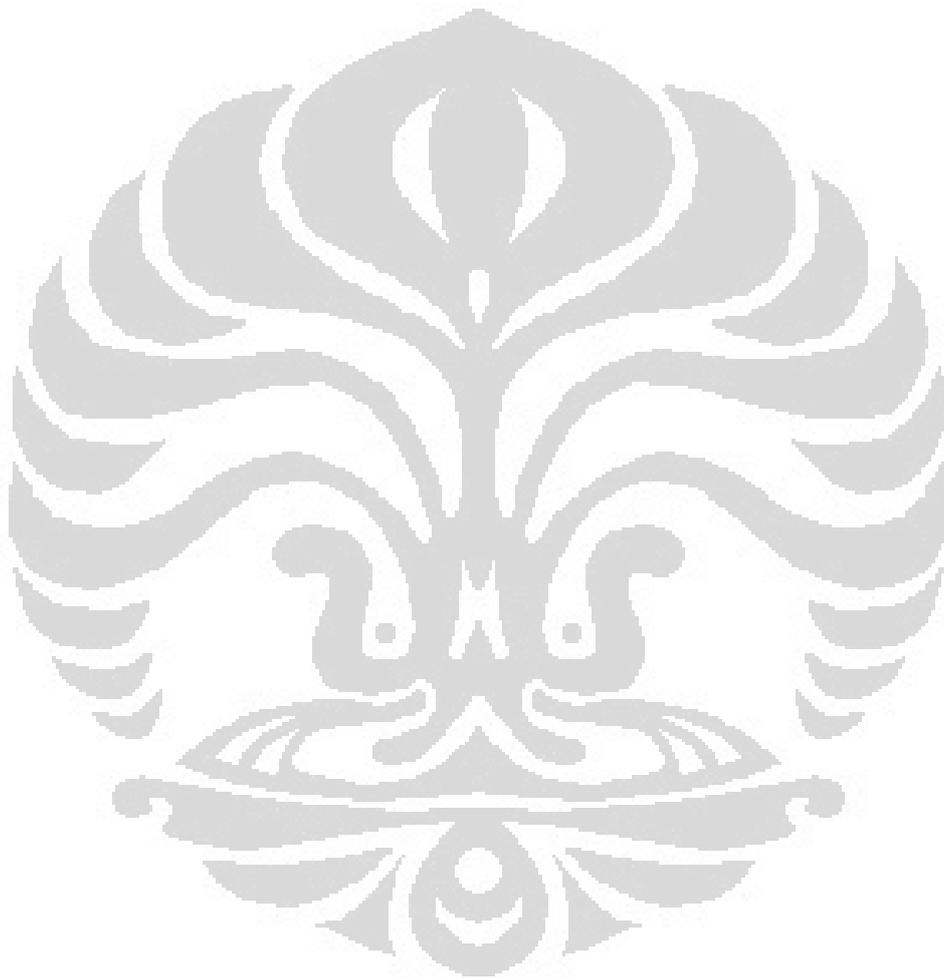
- Lampiran 17 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Uji Sensitivitas Model 2
- Lampiran 18 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitivitas Model 2
- Lampiran 19 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitivitas Model 2 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)
- Lampiran 20 Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Uji Sensitivitas Model 3
- Lampiran 21 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitivitas Model 3
- Lampiran 22 Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitivitas Model 3 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)
- Lampiran 23 Statistik Deskriptif Item Skor Efektifitas Dewan Komisaris
- Lampiran 24 Statistik Deskriptif Item Skor Efektifitas Komite Audit

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Prediksi Pengaruh Variabel Independen Utama
Tabel 3.2	Prediksi Pengaruh Variabel Kontrol
Tabel 4.1	Dasar Pemilihan Sampel
Tabel 4.2	Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Klasifikasi Bank
Tabel 4.3	Analisis Statistik Deskriptif Efektifitas Dewan Komisaris
Tabel 4.4	Analisis Statistik Deskriptif Efektifitas Komite Audit
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas
Tabel 4.6	Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 4.7	Pearson Correlation
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4.10	Uji Heteroskedasitas Model 1
Tabel 4.11	Uji Heteroskedasitas Model 2
Tabel 4.12	Uji Heteroskedasitas Model 3
Tabel 4.13	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 1
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 2
Tabel 4.15	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 3
Tabel 4.16	Ringkasan Hasil Hipotesis
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 1

Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 2

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPemikiran Model 1

Gambar 2.2 KerangkaPemikiran Model 2

Gambar 2.3 KerangkaPemikiran Model 3

Gambar 4.1 UjiNormalitas Model 1

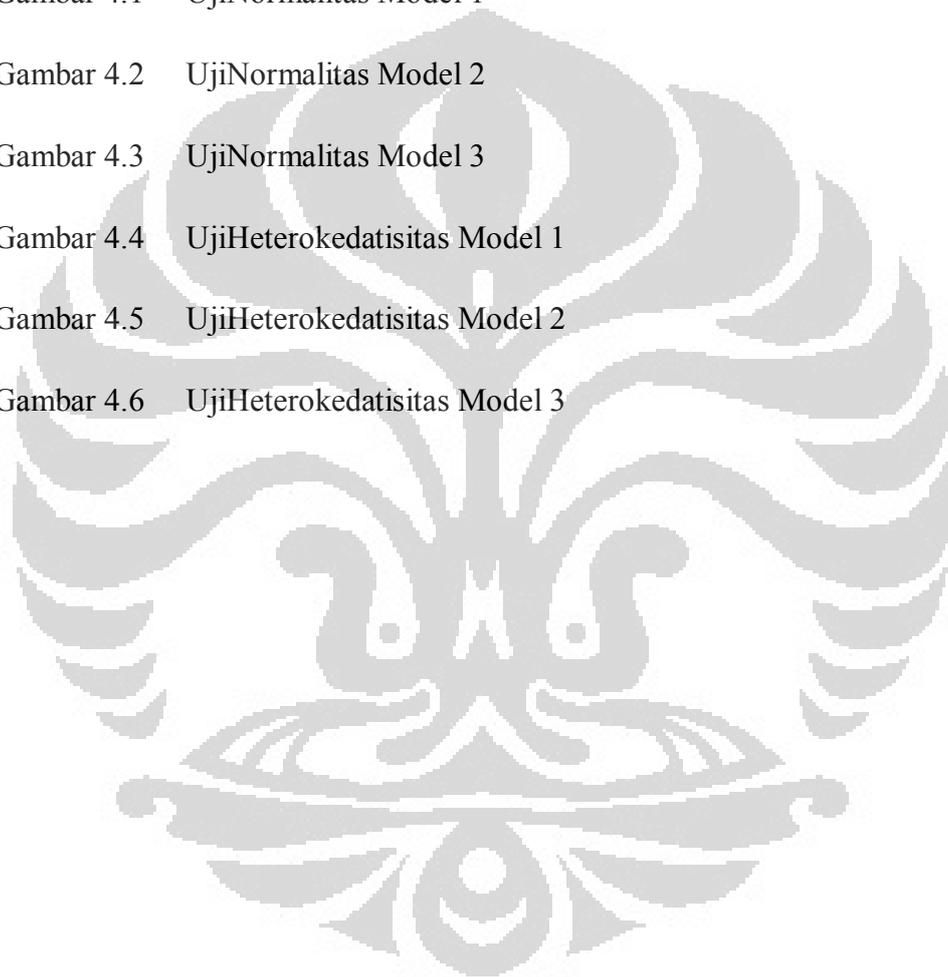
Gambar 4.2 UjiNormalitas Model 2

Gambar 4.3 UjiNormalitas Model 3

Gambar 4.4 UjiHeterokedatisitas Model 1

Gambar 4.5 UjiHeterokedatisitas Model 2

Gambar 4.6 UjiHeterokedatisitas Model 3



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera globalisasi saat ini, perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dan hal ini menjadi perhatian penting terutama bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Perkembangan pasar modal ini memberikan pengaruh yang secara langsung akan menjadi pendorong atas meningkatnya permintaan laporan keuangan, terutama laporan keuangan yang telah diaudit, oleh para pengguna informasi laporan keuangan sebagai dasar prediksi dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan. Meningkatnya permintaan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi tantangan tersendiri bagi auditor, terutama pada salah satu kriteria profesionalisme dari auditor yaitu ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu merupakan kriteria penting yang harus ditingkatkan oleh auditor agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan *auditee* dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila disajikan pada waktu yang tepat. Hal ini berkaitan juga dengan kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagi para investor, informasi laba merupakan salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi, dengan mengetahui kualitas laba perusahaan, investor dapat mengurangi resiko informasi (Schipper, 2004).

Undang-undang No. 8 tahun 1995 menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh BAPEPAM-LK pada tahun 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2006. Peraturan tersebut dikeluarkan melalui lampiran keputusan

ketua BAPEPAM-LK No.Kep-06/BL/2006, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu KEP-36/PM/2003.

Pelaksanaan proses audit yang sesuai dengan standar pekerjaan yang berlaku membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penyelesaiannya hingga ditandatanganinya laporan audit. Lamanya waktu antara tanggal laporan audit dengan laporan keuangan dapat mempengaruhi ketepatan waktu atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Perbedaan waktu antara tanggal opini audit dengan laporan keuangan mengindikasikan lamanya pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini yang disebut dengan *audit delay*.

Ada beberapa hal yang menyebabkan *audit delay*. Halim (2000) meneliti *audit delay* dengan menggunakan sampel 287 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1997. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain total *revenue*, jenis industri, bulan penutupan buku tahunan, lamanya menjadi klien KAP, rugi/laba operasi, tingkat profitabilitas, jenis opini. Hasil penelitian menunjukkan yang konsisten berpengaruh terhadap *audit delay* adalah tahun buku dan pelaporan kerugian.

Wirakusuma (2004) dalam penelitiannya yang menggunakan 132 pengamatan perusahaan di BEI, termasuk perusahaan yang tidak memiliki divisi internal audit, mengatakan bahwa ukuran perusahaan, jenis opini, tingkat solvabilitas, dan keberadaan internal audit berpengaruh signifikan pada rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan ke publik.

Selanjutnya dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), menjelaskan bahwa *audit delay* disebabkan oleh 5 faktor antara lain tingkat profitabilitas, besarnya aktiva, jenis industri, jenis opini audit, dan ukuran KAP. Kemudian dari penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap variable *audit delay*.

Auditor yang berfokus pada suatu industri akan mengembangkan kompetensi dan memperbaiki kualitas auditnya dalam industri yang terfokuskan,

sehingga menyebabkan auditor dengan spesialisasi industri dapat menyelesaikan auditnya lebih cepat (Ahsan, Habib & Md. Borhan, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahsan, Habib & Md. Borhan (2011) menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi industri dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat bila dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialisasi industri karena auditor spesialisasi industri memiliki pengetahuan yang signifikan tentang industri secara spesifik.

Menurut , Kulzig (2004), Blancet (2002), dan Prickett (2002), mengurangi *report lag* merupakan komponen dari *corporate governance* yang baik. Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk., 2000). *Corporate governance* merupakan cara-cara untuk memberikan keyakinan pada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). *Corporate governance* merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dalam menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diimplementasikan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Sam'ani, 2008).

Corporate governanace menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Marihot dan Doddy (2007) melakukan pengujian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap terjadinya manajemen laba perusahaan perbankan, hal ini berarti makin banyaknya komisaris independen dalam perusahaan berhasil

mengurangi manajemen laba yang terjadi. Kemudian ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan perbankan, artinya perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Keberadaan komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen.

Ancella (2009) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kualitas laba. Di dalam penelitiannya penilaian dari *corporate governance* sendiri menggunakan *scoring* yang telah ditentukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap ERC (*earnings response coefficient*). Sedangkan nilai komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ERC. Hal ini berarti perusahaan dengan efektifitas dewan komisaris yang baik mempunyai kualitas laba yang tinggi di dalam informasi keuangannya.

Abdelsalam dan Street (2007) melakukan penelitian yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan *timeliness* dari *corporate internet reporting* (CIR). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa direktur yang memiliki lintas jabatan dan lebih berpengalaman membutuhkan waktu yang lebih untuk CIR. Selain itu *role duality* dan *block ownership* juga mengindikasikan adanya hubungan dengan waktu CIR yang lebih rendah.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *corporate governance* mempunyai peran penting dalam *monitoring* perusahaan. Beberapa komponen penting yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yaitu mencakup komite audit dan dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dan komite audit yang efektif dapat menciptakan pengendalian internal perusahaan yang memadai. Informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih berkualitas dan dapat diandalkan. Dengan adanya *corporate governance* yang baik, kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan pelaporan atas informasi pada laporan keuangan juga semakin kecil. Hal ini dapat mengurangi *Control Risk* yang di yakini oleh auditor, sehingga auditor tidak perlu terlalu menekankan

Substantive Test of Transaction pada klien. Maka hal ini memungkinkan untuk memberikan pengaruh pada *audit delay*.

Faktor lainnya yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebagai salah satu bentuk konvergensi PSAK atas implementasi IFRS terhadap *audit delay*. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menciptakan standar akuntansi yang berkualitas dan berlaku secara internasional. Konvergensi PSAK atas implementasi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2008 dan diharapkan PSAK dapat mengadopsi IFRS sepenuhnya pada tahun 2012.

Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara PSAK yang berlaku selama ini dengan IFRS. Perbedaan pertama ialah IFRS menggunakan *principle base*, dimana penekanan lebih diutamakan pada substansi transaksi dan kesesuaian pelaporan dengan realitas ekonomi yang terjadi. Kedua, IFRS cenderung lebih menggunakan metode *fair value*. Ketiga, dalam IFRS diharuskan melakukan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Habib dan Bhuiyan (2011) menyimpulkan dari 502 perusahaan yang diamati, diperoleh hasil bahwa implementasi IFRS memperpanjang *audit delay*.

Berdasarkan uraian atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah mekanisme *corporate governance* yang mencakup auditor dengan spesialisasi industri, efektifitas komite audit, dan efektifitas dewan komisaris serta penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Pada penelitian kali ini, yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri perbankan. Sumber data-data yang diambil yaitu data perusahaan industri perbankan di Indonesia pada tahun 2009 – 2010. Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian *audit delay* kali ini mencoba mengaitkan *audit delay* dengan mekanisme *corporate governance*, serta menguji mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*. Selain itu juga menguji auditor spesialisasi industri dan mekanisme *corporate governance* sebagai

variabel pemoderasi hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay*.

Penulis tertarik untuk menggunakan industri perbankan karena pada beberapa penelitian di atas kebanyakan penelitian dilakukan menggunakan perusahaan-perusahaan selain sektor perbankan. Kemudian perkembangan industri perbankan juga mencerminkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi dan bisnis nasional. Selain itu industri perbankan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi dan memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus yang dimaksud ialah industri perbankan merupakan industri yang *highly-regulated* dan memiliki sistem akuntansi yang berbeda dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini mengakibatkan proses audit menjadi relatif lebih kompleks. Karakteristik khusus lainnya yaitu perusahaan yang bergerak industri perbankan memiliki banyak hubungan dengan pihak-pihak luar seperti nasabah, perusahaan yang mempercayakan dana kepada bank terkait, dan *stakeholder* lainnya. Hal ini menuntut adanya tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam penyajian informasinya. Hal ini juga yang menjadi pendorong bagi auditor untuk melakukan pekerjaan audit lebih teliti, sehingga diperoleh kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay*.

Penelitian di Indonesia yang meneliti mengenai *audit report lag* pada industri perbankan telah dilakukan oleh Karina (2011). Penelitian tersebut mengaitkan *tenure* KAP dengan *audit report lag*, serta meneliti pengaruh moderasi auditor spesialisasi industri terhadap hubungan *tenure* KAP tersebut dengan *audit report lag*. Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perbankan karena perkembangan industri perbankan di Indonesia relatif meningkat dari tahun ke tahun, dan masih sedikit penelitian tentang *audit delay* pada industri perbankan. Hal ini sekaligus menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa mengembangkan lebih jauh penelitian tentang *audit delay* terutama di sektor perbankan.

Dengan melakukan pengujian ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran kepada auditor serta pihak internal perusahaan untuk dapat

mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi perhatian utama, sehingga *audit delay* dapat diminimalisir dan laporan keuangan dapat disajikan lebih tepat waktu.

1.2 Identifikasi Masalah

Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan hasil audit sangat penting terutama bagi perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini menjadi penting bagi para pengguna laporan keuangan, karena para pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi yang cepat dimana kepastian informasi laporan keuangan tersebut harus dinilai relevan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum oleh pihak independen yakni auditor yang telah ditunjuk dan memiliki izin dari BAPEPAM – LK. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus terkait faktor-faktor yang mempengaruhi waktu audit.

Lamanya penyelesaian pelaporan audit dihitung dari dikeluarkannya tanggal laporan keuangan disebut *audit delay*. *Audit delay* ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian kali ini ingin mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada sektor perbankan. Fokus utama faktor yang diuji pada penelitian ini yaitu auditor spesialisasi industri, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Auditor Spesialisasi Industri berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah Efektifitas Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Efektifitas Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
5. Apakah Dewan Komisaris memoderasi hubungan antara Auditor Spesialisasi Industri dengan *Audit Delay*?
6. Apakah Komite Audit memoderasi hubungan antara Auditor Spesialisasi Industri dengan *Audit Delay*?

7. Apakah Auditor Spesialisasi Industri memoderasi hubungan antara Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *Audit Delay*?
8. Apakah Dewan Komisaris memoderasi hubungan antara Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *Audit Delay*?
9. Apakah Komite Audit memoderasi hubungan antara Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *Audit Delay*?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan tersebut meliputi:

1. Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi *audit delay* yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor spesialisasi industri, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).
2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan perbankan di Indonesia baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau tidak pada tahun 2009 – 2010.
3. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan, *annual report*, dan laporan auditor independen.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah auditor spesialisasi industri, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebagai *variable independen* utama berpengaruh terhadap *audit delay*, menguji pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap hubungan antara auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*, serta menguji pengaruh auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, dan komite audit terhadap hubungan antara penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay*.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi bagi auditor, untuk bisa membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada industri perbankan.
2. Membantu profesi pengauditan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses audit.
3. Memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait faktor faktor yang mempengaruhi waktu (*timeliness*) dalam proses pengeluaran laporan keuangan yang sudah di audit yang diukur dengan proksi *audit delay*.
4. Menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *timeliness* yang diukur dengan proksi *audit delay* bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam penulisan ini. Berikut ini adalah pemaparan secara garis besar sistematika penulisan penyusunan dan penjelasan dengan urutan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelaahan teoritis yang merupakan hasil dari penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur dan bahan-bahan bacaan lainnya yang diperoleh penulis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

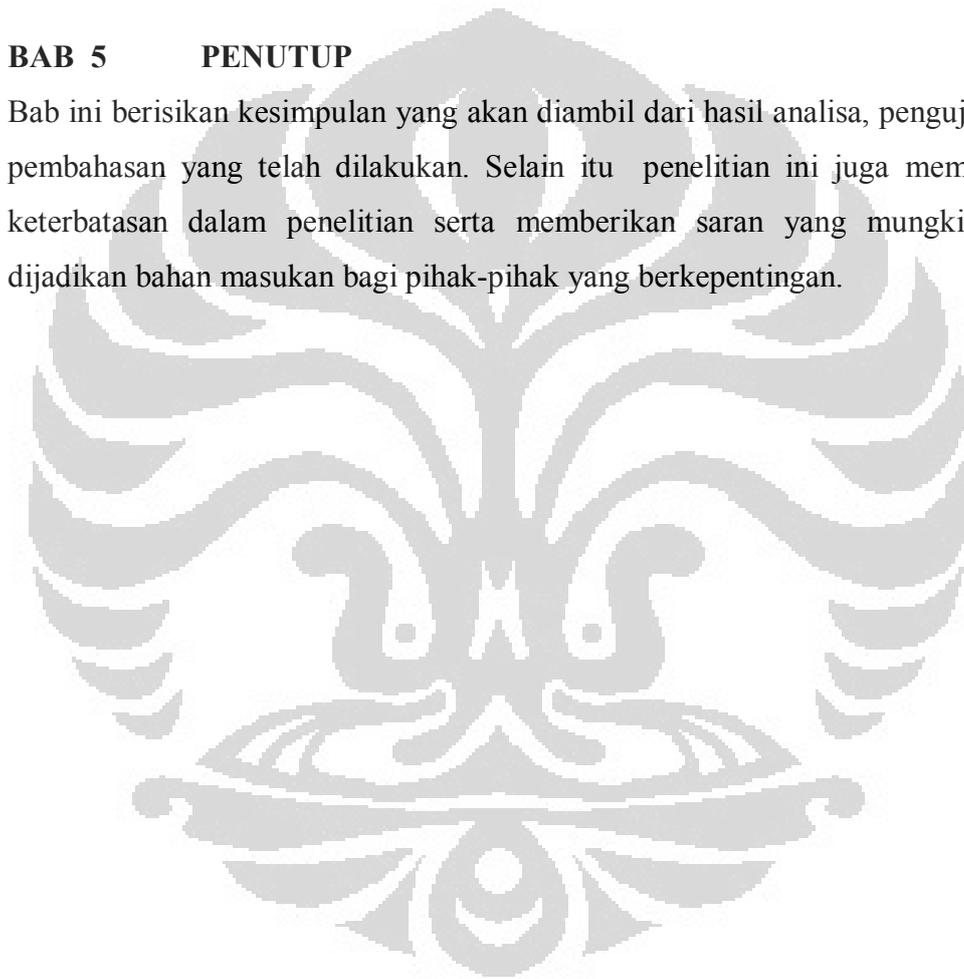
Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian secara lengkap, pengukuran variabel dan alat analisis yang digunakan, serta metode pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menganalisa dan menguji variabel-variabel penelitian yang akan diuji, serta menguraikan hasil analisis pengujian dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang akan diambil dari hasil analisa, pengujian, dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu penelitian ini juga memaparkan keterbatasan dalam penelitian serta memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pihak manajemen. Laporan keuangan memuat sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut serta perubahannya. Kinerja suatu perusahaan tercermin dalam angka pada laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter (Kieso *et.al.*, 2007).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berarti dengan laporan tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan (IAI, 2009) :

1. **Dapat dipahami** : Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah memudahkan pemakai untuk segera dipahami. Untuk mencapai tujuan ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.
2. **Relevan** : Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (*predictive value*), menegaskan atau memperbaiki harapan

yang dibuat sebelumnya (*feedback value*), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

3. **Keandalan** : Informasi dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang sebenarnya terjadi atau disajikan secara wajar.
4. **Dapat dibandingkan** : Identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan laporan keuangan perusahaan antar periode hendaknya dapat diperbandingkan oleh pemakai. Dengan demikian pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian karakteristik ini.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan. Karakteristik relevan di sini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu (*timeliness*). Ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan merupakan hal yang sangat penting. Informasi keuangan yang terkandung harus disajikan tepat pada periode-periode yang ditentukan oleh aturan-aturan atau standar yang berlaku umum.

2.2 Laporan Audit

Pembuatan laporan audit adalah langkah terakhir dan paling penting dari keseluruhan proses audit. Menurut Arens (2006), Laporan mengkomunikasikan temuan-temuan auditor, oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan *assurance*. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan audit untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan. Laporan Auditor adalah *output primer* atau keluaran utama dari audit. Laporan audit melaporkan temuan auditor kepada pengguna laporan keuangan, dan dikenal juga sebagai pendapat audit, merupakan puncak dari proses pengumpulan dan evaluasi

bahan bukti yang cukup dan kompeten, sehubungan dengan asersi manajer untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Secara umum laporan auditor dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.

2.3 Standar Pengauditan

Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002). IAI (2009) telah menetapkan standar auditing sebagai berikut :

1. Standar Umum,

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu makin lama, demikian pula sebaliknya. Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu mengakibatkan auditor cenderung mengambil pilihan mengabaikan standar, sementara di sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor untuk melaksanakan audit sesuai standar.

2.4 Bank di Indonesia

2.4.1 Bank dan Perbankan

Bank dikenal masyarakat sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berhubungan dengan bidang keuangan. Secara spesifik bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang (Bastian dan Suhardjono, 2006). Sementara menurut undang-undang perbankan Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan definisi bank sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha suatu bank. Perbankan memiliki peran sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

Sigifikansi perbankan bagi suatu negara mengharuskan pemerintah untuk menetapkan regulasi yang ketat bagi sektor perbankan. Regulasi yang demikian ketat diperlukan karena kegagalan bank yang bersifat sistemik dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang mengganggu perekonomian (Abdullah, 2002). Keberadaan bank dan perbankan pada suatu negara tidak terlepas dari adanya bank sentral yang dimiliki oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa adanya Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian dijelaskan pada Pasal 8 butir c undang-undang yang sama, bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengatur dan mengawasi bank, dalam konteks ini adalah bank-bank yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia fungsi pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia mencakup penetapan peraturan, pemberian dan pencabutan izin atas kelembagaan

dan kegiatan usaha bank, pelaksanaan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung (Pasal 27), serta penetapan sanksi atas pelanggaran peraturan oleh bank. Dari paparan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan dan ketentuan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank, serta sektor perbankan di Indonesia pada umumnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.4.2 Klasifikasi Bank

Dalam menjalankan fungsi perbankan, bank-bank di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis bila ditinjau dari berbagai aspek. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, klasifikasi bank di Indonesia yaitu :

1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penggunaan istilah sehari-hari, bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial.
2. Bank perkreditan rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan kepemilikannya (Kasmir, 2005), bank dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah disebut jugadengan bank persero.
2. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional dengan akte pendirian yang didirikan oleh pihak swasta. Oleh karenanya pembagian keuntungan bank juga diperoleh swasta. Dalam klasifikasi ini termasuk pula Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), bank yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan dengan badan hukum koperasi yang pada perkembangan

selanjutnya mengubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) pada tahun 1993.

3. Bank milik asing, merupakan perwakilan atau kantor cabang dari bank-bank induk yang berkedudukan di luar negeri, baik yang dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Bank-bank asing ini menjalankan fungsi sebagaimana fungsi bank-bank umum swasta nasional dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank milik campuran, merupakan bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Klasifikasi berdasarkan status bank, yang menunjukkan kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanan (Kasmir, 2005) :

1. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya pengiriman uang ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, dan transaksi internasional lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank non-devisa, merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi internasional. Dengan kata lain, bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi domestik (dalam negeri).

Klasifikasi bank berdasarkan metode penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli (Kasmir, 2005) :

1. Bank konvensional, merupakan bank yang menetapkan suku bunga pada tingkat tertentu sebagai harga, baik pada produk simpanan maupun produk pinjaman bank.
2. Bank syariah, merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah sebagai dasar kegiatan perbankan yang dilakukan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pada pembahasan kali ini yang menjadi objek penelitian yaitu berfokus pada bank umum konvensional di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan karena bank perkreditan rakyat serta bank syariah memiliki ketentuan dan atau format laporan keuangan yang berbeda.

2.4.3 Laporan Keuangan Bank Umum Konvensional

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) Revisi 2008 (Tim Perumus PAPI, 2008), laporan keuangan bank bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengguna laporan keuangan bank mencakup pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan tersebut antara lain deposan, kreditur, pemegang saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan, dan masyarakat.

Komponen laporan keuangan bank pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya, yaitu terdiri dari Laporan Posisi Keuangan akhir periode, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif (PSAK Nomor 1, 2009). Namun perbedaan pelaporan keuangan bank dengan pelaporan keuangan perusahaan pada industri lain terletak pada waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, bank diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara berkala yang terdiri dari Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Dalam Laporan Tahunan Bank termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Tahunan Bank yang memuat seluruh komponen laporan keuangan secara lengkap.

Selain itu perbedaan laporan keuangan bank dengan laporan keuangan perusahaan non-perbankan terletak pada format masing-masing komponen laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya pos-pos pencatatan tertentu yang hanya terdapat dalam kegiatan operasional suatu bank.

2.5 Ketepatan Waktu dan Regulasi

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur didalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan : (1) selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, (3) selambat-lambatnya 120 hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan buku perusahaan berakhir. Namun sejak tanggal 31 Juli 2006, BAPEPAM-LK semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat keputusan ketua BAPEPAM-LK yaitu Kep-06/BL/2006 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu KEP-36/PM/2003.

Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian dilihat dari keterlambatan pelaporan (*lag*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Naim (1998), ketepatan waktu dilihat dari keterlambatan pelaporan. Keterlambatan pelaporan terjadi jika perusahaan melaporkan informasi keuangannya kepada BAPEPAM-LK setelah tanggal 31 Maret, hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK tahun 1995.

Regulasi terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan bank yang telah diaudit dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Kewajiban pelaksanaan audit atas laporan keuangan secara khusus diberlakukan terhadap laporan keuangan bank periode tahunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 2 peraturan yang sama, dimana audit atas laporan keuangan bank dilakukan oleh auditor yang telah terdaftar di Bank Indonesia (Pasal 21, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank). Pasal 4 ayat 1 peraturan yang sama menyebutkan laporan tahunan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan auditan akan mengakibatkan sejumlah sanksi yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana tertera pada Bab IX Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Bagian Kedua tentang Sanksi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Dalam hal dimana bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), wajib memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), termasuk regulasi terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan. Selain itu, peraturan tambahan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan auditan bank yang terdaftar di BEI dikeluarkan melalui Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Sanksi keterlambatan tertera dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi.

2.6 *Audit Delay*

Menurut Ang (1997) dalam penelitian Respati (2004), mengatakan bahwa informasi harus selesai dengan tepat waktu dapat diartikan bahwa jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum. Informasi dapat dikatakan relevan dan berkualitas apabila informasi tersebut tersampaikan pada waktu yang tepat. Menurut Baridwan (1992) tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari terjadinya penundaan pengambilan keputusan. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian menggunakan keterlambatan pelaporan (*lag*) sebagai indikatornya. Menurut Habib dan Bhuiyan (2011) *Audit Report Lag* atau *audit delay* pada penelitian ini adalah salah satu dari beberapa variabel hasil audit yang menjadi indikator bagi pihak luar atas efisiensi audit, karena berkaitan dengan ketepatan waktu baik ketepatan waktu audit maupun informasi laba. Di dalam penelitiannya, Halim (2000), mengatakan bahwa "*audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan". Hal ini mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor hingga ditandatanganinya laporan audit. Semakin panjang *audit delay* maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Lama atau tidaknya penyelesaian laporan audit hingga ditandatanganinya laporan audit dapat dilihat dari isi laporan keuangan *auditee* atau klien itu sendiri seperti, apakah terdapat penyimpangan, keterbatasan dalam pengumpulan bahan bukti atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Disamping itu, lama atau tidaknya penyelesaian laporan audit juga bisa disebabkan oleh pihak manajemen yang terlambat dalam memberikan laporan keuangan yang akan diaudit kepada auditor. Pada umumnya, laporan audit yang telah dipublikasikan merupakan cerminan kinerja perusahaan yang diaudit, semakin cepat diterbitkan maka semakin relevan informasi tersebut bagi pemakai laporan keuangan (Habib dan Bhuiyan, 2011).

2.7 Auditor Spesialisasi Industri dan *Audit Delay*

Menurut Manurung (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri dapat dilihat pada tingkatan dimana seorang auditor mampu menghasilkan kualitas audit yang baik berdasarkan atas pengetahuan, keahlian, dan pengalaman auditor yang baik atas perusahaan pada suatu industri tertentu.

Maletta & Wright (1996) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri adalah auditor yang memiliki pengetahuan spesifik tentang industri tertentu, sehingga auditor tersebut memiliki pemahaman yang menyeluruh atas karakteristik perusahaan dalam industri tersebut.

Salomon, Shields, & Whittington (1999) dalam Hartanto (2010) menyatakan bahwa auditor dapat dikatakan spesialis pada industri tertentu apabila auditor tersebut telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berfokus dalam industri tertentu.

Tujuan auditor melakukan spesialisasi pada industri tertentu adalah untuk mencapai diferensiasi produk dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi pada industri yang dispesialisasikan. Didukung juga dengan fakta bahwa kemampuan tersebut muncul karena pengalaman auditor dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama (Dunn & Mayhew, 2004).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa spesialisasi industri auditor adalah auditor yang memiliki pemahaman serta kemampuan yang spesifik pada suatu industri tertentu yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman auditor dalam mengaudit maupun pelatihan-pelatihan khusus mengenai audit suatu industri tertentu sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

Spesialisasi industri auditor dapat diukur dengan tiga cara. Pertama, spesialis industri diidentifikasi dengan mengacu pada pangsa pasar dan penjualan klien pada suatu industri (Palmrose, 1986; Dunn & Mayhew, 2004). Kedua, spesialis industri diidentifikasi dengan total aset dari klien (Hogan & Jeter, 1999; Mayhew dan Wilkins, 2002; Gul, Fung, & Jaggi, 2009). Dalam hal ini auditor dinilai sebagai spesialis apabila akumulasi penjualan atau total aset dari klien-kliennya adalah yang terbesar di suatu industri. Ketiga, spesialisasi industri dinilai berdasarkan jumlah klien. Berdasarkan penilaian ini auditor dikatakan sebagai

spesialis jika memiliki jumlah klien yang dominan dalam suatu industri (Balsam, Krishnan, & Yang, 2003).

Habib dan Bhuiyan (2011) dalam penelitiannya menemukan auditor spesialisasi industri dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan non spesialisasi industri auditor, yang direfleksikan dengan *Audit Report Lag* yang lebih pendek. Pada penelitian ini sampel yang diambil yaitu sebanyak 502 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Selandia Baru selama periode 2004-2008. Dalam penelitiannya, Habib dan Bhuiyan (2011) mengukur spesialisasi industri auditor dengan menggunakan proksi pangsa pasar KAP.

Karina (2011) dalam penelitiannya menguji pengaruh moderasi auditor spesialisasi industri terhadap hubungan *tenure* audit dengan *audit report lag*. Pengujian atas moderasi tersebut dilakukan pada pengujian utama dan pengujian tambahan. Pengujian utama menggunakan *tenure* audit dengan variabel *dummy*, sedangkan pengujian tambahan menggunakan *tenure* audit yang dihitung secara akumulatif. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara pengujian utama dan pengujian tambahan. Pada pengujian utama auditor spesialisasi industri tidak memberi pengaruh terhadap hubungan *tenure* KAP dengan *audit report lag*, sedangkan pada pengujian tambahan auditor spesialisasi industri terbukti memberi pengaruh terhadap hubungan *tenure* KAP dengan *audit report lag*.

2.8 Corporate Governance dan Audit Delay

Teori keagenan dimulai dengan asumsi bahwa orang bertindak sendiri untuk kepentingan pribadi mereka, dan berpegang pada kondisi normal, tujuan, kepentingan, dan risiko dari *principal* dan *agent* yang tidak identik. Teori keagenan menyatakan bahwa ketika seorang manajer tidak memiliki 100% saham perusahaan, pasti akan menjadi konflik yang laten antara pemegang saham dan manajer. Hal ini menyebabkan banyak masalah keagenan, seperti pengeluaran berlebihan sebagai akibat dari hak-hak istimewa, keputusan investasi suboptimal, asimetri informasi, dan pembelian keuangan, (Jensen & Meckling dalam Jasim al-Ajmi, 2008). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah keagenan adalah praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003).

Pelaksanaan *good corporate governance* perbankan, dalam hal ini adalah bank umum, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006. Peraturan Bank Indonesia ini menetapkan hal mengenai aspek-aspek *GCG* antara lain tentang prinsip *GCG*, Independensi, dewan komisaris, direksi, komite-komite, fungsi kepatuhan, audit intern, audit ekstern, penerapan manajemen resiko, penyediaan dana, rencana strategis, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini variabel *corporate governance* yang akan digunakan yaitu dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. (Sam'ani, 2008).

Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Effendi

(2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kualitas laba. Marihot dan Doddy (2007) melakukan pengujian pengaruh dari *corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Ancella (2009) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara *corporate governance* dengan kualitas laba yang pengukurannya dilakukan dengan *scoring* pada kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap ERC (*earnings response coefficient*) sedangkan efektifitas komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ERC. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance* secara efektif dapat mengurangi tindak manipulasi laba dan meningkatkan alur informasi yang efisien sehingga menghasilkan informasi yang *reliable* dan relevan. Menurut Kulzig (2004), Blancet (2002), dan Prickett (2002), berkurangnya *report lag* merupakan komponen dari *corporate governance* yang baik. Abdelsalam dan Street (2007) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate internet reporting timeliness*. Dari pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa *board independence* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *CIR timeliness*, sedangkan *board experience* berpengaruh positif secara signifikan *CIR timeliness*.

2.9 Implementasi IFRS (Penerapan PSAK 50/55 Revisi 2006) dan Audit Delay

Usaha dalam meningkatkan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan telah terlihat dari komitmen berbagai negara untuk menggunakan sebuah standar

akuntansi yang berkualitas dan dapat diimplementasikan secara bersama-sama. Seperti halnya yang dilakukan oleh Negara-negara yang tergabung dalam G20 (kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia) yang menciptakan standar akuntansi global berkualitas dalam tujuannya mereformasi sektor keuangan (Declaration on Strengthening The Financial System dalam Iskandar, 2011). Standar akuntansi yang dimaksud adalah *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam G20, juga harus melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menuju IFRS. Adopsi IFRS terhadap PSAK dilakukan secara bertahap. Berdasarkan pernyataan IAI (www.iaiglobal.or.id), konvergensi PSAK secara penuh menuju IFRS akan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap adopsi (2008 – 2010), tahap persiapan akhir (2011), dan tahap implementasi (2012).

PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan standar akuntansi yang mengacu pada sistem IFRS. Aturan ini diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC) atau *International Accounting Standard Board* (IASB). PSAK 50 mengatur tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, sementara PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Dengan adanya penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih relevan dan reliabel. Akan tetapi dilain sisi, penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan hal baru yang kompleks sehingga didalam penerapannya membutuhkan ketelitian yang tinggi. Hal inilah yang mungkin menyebabkan *audit delay* lebih panjang.

Habib dan Bhuiyan (2011) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Selandia Baru tahun 2004 – 2008 mengenai implementasi IFRS terhadap *Audit Report Lag* (ARL). Implementasi IFRS yang diadopsi diimplementasikan secara serentak. Habib dan Bhuiyan (2011) dalam penelitiannya menggunakan *dummy* tahun, bernilai 1 diberikan pada tahun setelah penerapan IFRS dan bernilai 0 apabila sebaliknya. Tujuannya adalah melihat perubahan ARL sebelum dan sesudah implementasi IFRS. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi IFRS menyebabkan ARL lebih

panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Abraham (2011) yang melakukan pengujian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil pengujiannya menemukan bahwa implementasi IFRS menyebabkan ARL lebih panjang.

2.10 Kerangka Pemikiran

Audit delay merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. *Audit delay* dapat mengindikasikan lamanya proses penyelesaian laporan audit hingga ditandatanganinya laporan audit yang dilakukan oleh auditor. Selain itu *audit delay* juga mengindikasikan *timeliness* perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan.

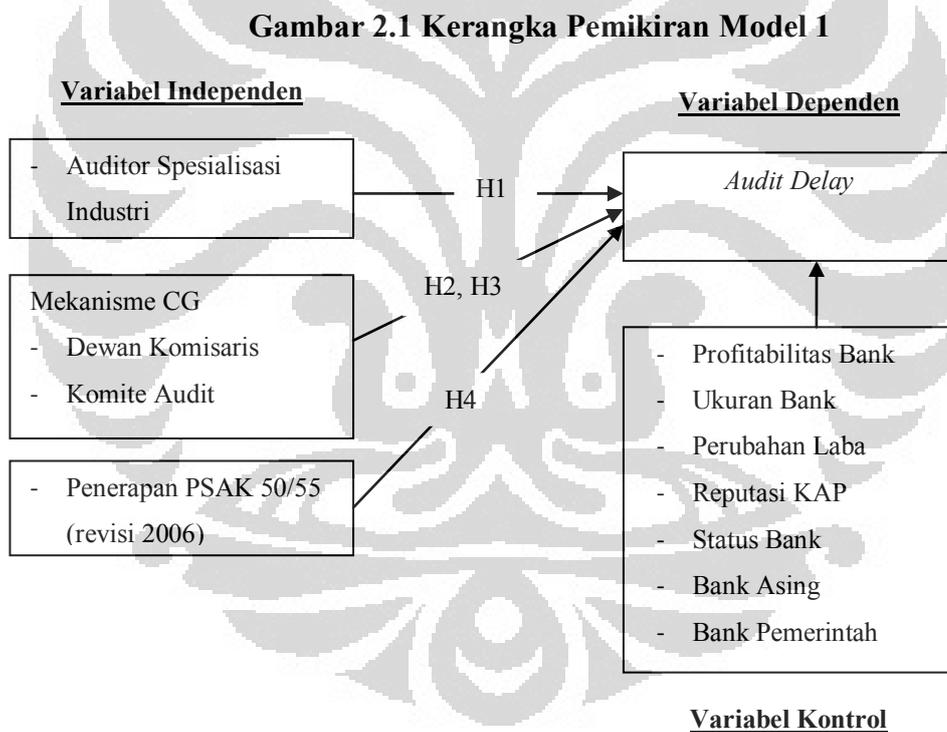
Keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit hingga ditandatanganinya laporan audit oleh auditor atau yang sering disebut *audit delay* dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian kali ini ada empat faktor yang akan diuji sebagai variabel independen utama yaitu auditor spesialisasi industri, efektifitas komite audit, efektifitas dewan komisaris, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006).

Auditor dengan spesialisasi industri akan memiliki pengetahuan yang lebih terhadap industri spesifik tersebut. Hal ini membuat auditor spesialisasi industri dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan yang non-spesialisasi industri. Dengan demikian, auditor spesialisasi industri memiliki kemungkinan untuk memberi pengaruh terhadap *audit delay*.

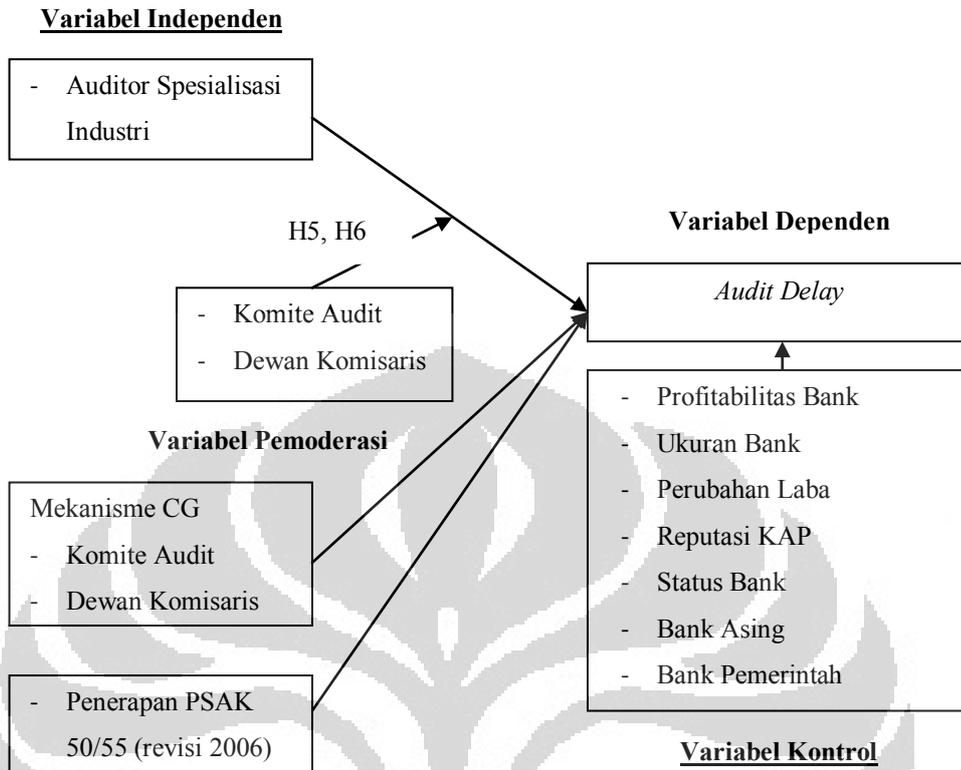
Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan menciptakan pengendalian internal yang memadai dan dapat menjadi pendukung perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya *corporate governance* yang baik maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan pelaporan atas informasi pada laporan keuangan juga semakin kecil. Hal ini dapat mengurangi *Control Risk* yang di yakini oleh auditor, sehingga auditor tidak perlu terlalu menekankan *Substantive Test of Transaction* pada klien. Hal ini memberikan kemungkinan adanya pengaruh terhadap *audit delay*.

Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konvergensi PSAK ke IFRS yang berkaitan dengan industri

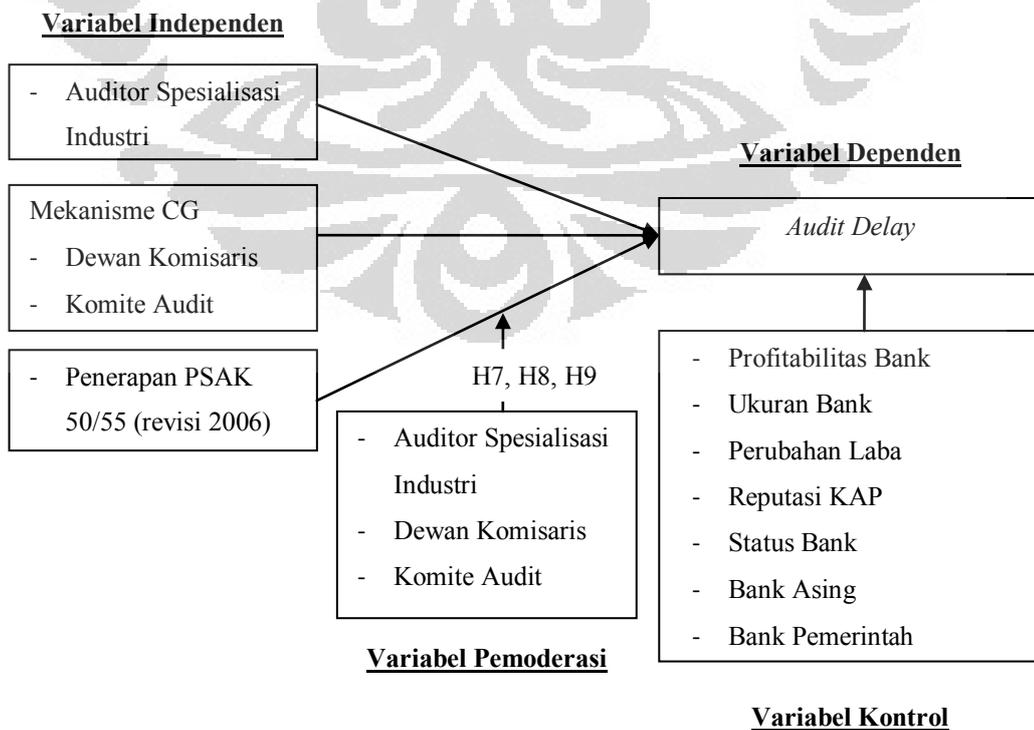
perbankan. Konvergensi yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan bertahap menuju konvergensi IFRS secara penuh. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yakni meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Implementasi PSAK 50/55 (revisi 2006) ini membuat resiko audit menjadi meningkat karena karakteristik IFRS yang lebih meningkatkan pada *principle base*, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Hal ini memberikan kemungkinan adanya pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan pemaparan argumen diatas dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Model 2



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Model 3



2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Auditor Spesialisasi Industri dan *Audit Delay*

Salah satu indikator yang menunjukkan perbedaan antara auditor yang memiliki kualitas baik dengan yang tidak adalah tingkat spesialisasi auditor pada suatu industri. Auditor yang menspesialisasikan diri pada suatu industri melakukan investasi besar-besaran pada teknologi, fasilitas, dan sumber daya manusia dengan tujuan pengembangan pengetahuan pada industri tertentu dan memperoleh jumlah klien yang lebih banyak sehingga dapat bekerja pada skala ekonomis yang tidak dapat dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki spesialisasi pada industri tertentu (Mayhew & Wilkins, 2003).

Beberapa penelitian telah melakukan pengujian atas pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit dengan menggunakan beberapa proksi. Dalam penelitian kali ini akan dilakukan pengujian mengenai pengaruh antara spesialisasi industri auditor dengan ketepatan waktu yang diproksikan dengan *audit delay*.

Penelitian ini mengharapkan auditor spesialisasi industri menyebabkan *audit delay* menjadi lebih pendek karena adanya pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman yang komprehensif dari auditor spesialisasi industri. Selain itu juga auditor dengan spesialisasi industri diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks pada industri terkait dibandingkan auditor yang tidak spesialis pada industri tertentu. Dalam penelitian Habib dan Bhuiyan (2011) menunjukkan bahwa auditor dengan spesialisasi industri dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan auditor non-spesialisasi industri karena auditor spesialisasi industri memiliki pengetahuan yang signifikan atas industri secara spesifik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abraham (2011) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri menghasilkan ARL yang lebih pendek. Karina (2011) yang melakukan penelitian pada industri perbankan menguji pengaruh auditor spesialisasi sebagai pemoderasi hubungan *tenure* audit terhadap ARL. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dua hasil yang berlawanan, pada pengujian utama, auditor spesialisasi industri tidak berpengaruh terhadap hubungan *tenure* audit dengan ARL apabila *tenure* audit diukur dengan variabel *dummy*. Pada pengujian tambahan auditor spesialisasi industri

berpengaruh terhadap hubungan *tenure* audit dengan ARL jika *tenure* audit dihitung secara akumulatif.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan *audit delay* dapat lebih pendek karena pekerjaan audit yang lebih efisien dapat dilakukan oleh auditor dengan spesialisasi industri. Atas argumen tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H1 : Auditor Spesialisasi Industri berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.11.2 *Corporate Governace dan Audit Delay*

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak aspek. *Corporate governanace* menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Informasi yang relevan dan reliabel sangat dibutuhkan dalam berjalannya bisnis perusahaan. Perusahaan yang memiliki mekanisme internal *corporate governance* (dewan komisaris dan komite audit) yang baik akan memiliki pengendalian internal dan sistem informasi yang memadai. Dengan adanya pengendalian internal dan sistem informasi yang memadai maka informasi laporan keuangan yang berkualitas dapat disajikan pada waktu yang tepat. Selain itu pengendalian internal yang memadai juga memperkecil kemungkinan terjadinya informasi yang bias baik disebabkan oleh adanya kecurangan ataupun kesalahan pelaporan yang tidak disengaja. Informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Bagi auditor, adanya tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi *Control Risk* yang diyakini auditor sehingga auditor tidak perlu terlalu menekankan *substantive test of transaction*. Hubungan antara resiko pengendalian (*CR*) dan resiko deteksi yang direncanakan (*PDR*) adalah berbanding terbalik, sedangkan hubungan antara resiko pengendalian dan bukti substantif bersifat langsung (Arens, 2008 : 331) . Jika disimpulkan bahwa dengan adanya *Good Corporate Governance* menciptakan

pengendalian internal yang efektif, maka resiko deteksi yang direncanakan (*PDR*) dapat diperbesar sehingga bukti dapat dikurangi. Auditor dapat memperbesar resiko deteksi yang direncanakan (*PDR*) apabila pengendaliannya efektif, karena *internal control* yang efektif akan memperkecil kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

Apabila auditor menilai perusahaan memiliki tata kelola yang baik, sehingga meyakini resiko pengendaliannya rendah, maka auditor tidak akan menekankan *Substantive Test of Transaction* demi efisiensi waktu proses audit. Hal ini memungkinkan untuk memberi pengaruh pada *audit delay*. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H2 : Efektifitas Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

H3 : Efektifitas Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.11.3 Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan *Audit Delay*

Implementasi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2008. IFRS memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan PSAK yang berlaku selama ini. IFRS menekankan pada *principle base* yang menekankan lebih kepada substansi transaksi. IFRS juga cenderung menggunakan *fair value* dalam penyajian laporan keuangannya. Selain itu IFRS mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan baik kuantitatif maupun kualitatif.

Habib dan Bhuiyan (2011) menyimpulkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan risiko audit karena karakteristik IFRS yang lebih menekankan pada *prinsip base* sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan pekerjaan audit.

PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan standar akuntansi yang berkaitan dengan industri perbankan yang juga mengalami konvergensi IFRS. Karena adanya perbedaan karakteristik antara PSAK yang berlaku sebelumnya dengan PSAK yang sudah mengadopsi IFRS maka dapat menyebabkan meningkatnya resiko audit, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih panjang untuk pekerjaan auditnya. Disamping itu juga, penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006)

bersifat kompleks sehingga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten serta teknologi informasi yang memadai, hal ini dapat memberi pengaruh terhadap *timeliness* dari penyajian laporan keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H4 : Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*.

2.11.4 Pengaruh Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Hubungan Auditor Spesialisasi Industri dengan *Audit Delay*

Komite audit dan dewan komisaris merupakan salah satu bentuk dari mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris sebagai salah satu bentuk mekanisme *corporate governance* memiliki fungsi melakukan pengawasan secara umum terhadap kinerja perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi atas kebijakan yang akan diambil (Marihhot dan Doddy, 2007). Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan, dewan komisaris membentuk komite audit sebagai perpanjangan tangannya yang memiliki tugas khusus berkaitan dengan informasi keuangan.

Fungsi pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Marihhot dan Doddy, 2007). Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan oleh manajemen yang kemudian dinilai oleh eksternal auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa komite audit memiliki perhatian khusus dalam menentukan auditor eksternal untuk melakukan pekerjaan audit. Komite audit akan melakukan seleksi dan memilih auditor eksternal yang

memiliki integritas yang baik. Selain itu komite audit juga melakukan *monitoring* atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor dengan spesialisasi industri merupakan auditor yang memiliki kompetensi khusus yang berfokus pada industri spesifik. Fitriany (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas audit. Selain itu komite audit juga berpengaruh terhadap hubungan spesialisasi dengan kualitas audit dari sisi *timeliness*. Atas dasar inilah maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H5 : Dewan Komisaris memperkuat pengaruh negatif Auditor Spesialisasi Industri terhadap *Audit Delay*.

H6 : Komite Audit memperkuat pengaruh negatif Auditor Spesialisasi Industri terhadap *Audit Delay*.

2.11.5 Pengaruh Moderasi Auditor Spesialisasi Industri terhadap Hubungan Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *Audit Delay*

Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan salah satu konvergensi PSAK menuju IFRS yang harus dilakukan oleh seluruh perbankan di Indonesia. Penerapan ini memberikan dampak pada meningkatnya resiko audit, sehingga auditor independen harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses audit. Hal ini membuat auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan audit, sehingga penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) ini memungkinkan untuk memberi pengaruh terhadap *audit delay*. Kemudian di samping hal tersebut, Habib dan Bhuiyan (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri terbukti dapat menghasilkan audit dengan *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi industri. Dengan adanya kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor spesialisasi industri diharapkan mampu memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap hubungannya dengan *audit delay*. Berdasarkan hal ini maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H7 : Auditor Spesialisasi Industri memperlemah pengaruh positif Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *Audit Delay*.

2.11.6 Pengaruh Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Hubungan Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *Audit Delay*

Mekanisme internal *corporate governance* perusahaan merupakan hal yang menjadi perhatian utama pada setiap perusahaan, terutama perusahaan di industri perbankan yang bersifat *highly-regulated*. Perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik dapat menciptakan pengendalian internal dan sistem informasi yang memadai. Dengan demikian, perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang baik diharapkan mampu menyediakan informasi laporan keuangan yang lebih berkualitas dan tepat waktu. Mekanisme internal *corporate governance* yang menjadi fokus pada penelitian kali ini adalah efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit. Pada hipotesis sebelumnya yang diajukan di penelitian ini, efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit diharapkan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kemudian disamping itu, penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diduga dapat memberikan pengaruh positif terhadap hubungannya dengan *audit delay*. Berdasarkan pemaparan diatas, efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit juga diharapkan mampu memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*. Berdasarkan hal ini maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

- H8 : Dewan Komisaris memperlemah pengaruh positif Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *Audit Delay*.**
- H9 : Komite Audit memperlemah pengaruh positif Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *Audit Delay*.**

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2010 : 262). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang ada di Indonesia baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun tidak. Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kebutuhan/kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sugiyono, 2008:122). Kriteria untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan perbankan di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan dan laporan audit selama periode tahun 2009 sampai tahun 2010 secara berturut-turut.
2. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya.
3. Perusahaan memiliki periode laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember.
4. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada penelitian ini tersedia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data yang telah diolah dan diperoleh dari pihak lain dalam bentuk sudah jadi yang berupa publikasi. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan auditan dan laporan tahunan perusahaan dari tahun 2009 hingga 2010 yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>), database *Reuters Knowledge, Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*, Pusat Data Ekonomi dan Bisnis (PDEB) FEUI, dan situs masing-masing bank sampel.

3.3 Model Penelitian

Model pertama untuk menguji apakah auditor spesialis industri dan mekanisme internal *corporate governance* (dewan komisaris dan komite audit) serta penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh terhadap *audit delay* (hipotesis Ha1, Ha2, Ha3, Ha4) adalah sebagai berikut :

$$\text{AUDLAY}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{SPEC}_{it} + \alpha_2 \text{DEKOM}_{it} + \alpha_3 \text{KOMDIT}_{it} + \alpha_4 \text{PSAK}_{it} + \alpha_5 \text{ROA}_{it} + \alpha_6 \text{SIZE}_{it} + \alpha_7 \text{NEWS}_{it} + \alpha_8 \text{KAP}_{it} + \alpha_9 \text{PUBLIC}_{it} + \alpha_{10} \text{FOR}_{it} + \alpha_{11} \text{GOV}_{it} + \epsilon_{it}$$

Ekspektasi hasil : H1 = $\alpha_1 < 0$; H2 = $\alpha_2 < 0$; H3 = $\alpha_3 < 0$; H4 = $\alpha_4 > 0$

(Model 1)

Model kedua yang menguji apakah dewan komisaris dan komite audit memperkuat pengaruh negatif auditor spesialisasi industri terhadap *audit delay* (hipotesis Ha5 dan Ha6) adalah sebagai berikut :

$$\text{AUDLAY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SPEC}_{it} + \beta_2 \text{DEKOM}_{it} + \beta_3 \text{KOMDIT}_{it} + \beta_4 \text{PSAK}_{it} + \beta_5 \text{SPEC} * \text{DEKOM}_{it} + \beta_6 \text{SPEC} * \text{KOMDIT}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{SIZE}_{it} + \beta_9 \text{NEWS}_{it} + \beta_{10} \text{KAP}_{it} + \beta_{11} \text{PUBLIC}_{it} + \beta_{12} \text{FOR}_{it} + \beta_{13} \text{GOV}_{it} + \epsilon_{it}$$

Ekspektasi hasil : H5 = $\beta_5 < 0$; H6 = $\beta_6 < 0$

(Model 2)

Model ketiga yang menguji apakah auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, dan komite audit memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay* (hipotesis Ha7, Ha8, dan Ha9) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{AUDLAY}_{it} = & \vartheta_0 + \vartheta_1 \text{SPEC}_{it} + \vartheta_2 \text{DEKOM}_{it} + \vartheta_3 \text{KOMDIT}_{it} + \vartheta_4 \text{PSAK}_{it} + \\ & \vartheta_5 \text{PSAK} * \text{SPEC}_{it} + \vartheta_6 \text{PSAK} * \text{DEKOM}_{it} + \vartheta_7 \text{PSAK} * \text{KOMDIT}_{it} \\ & + \vartheta_8 \text{ROA}_{it} + \vartheta_9 \text{SIZE}_{it} + \vartheta_{10} \text{NEWS}_{it} + \vartheta_{11} \text{KAP}_{it} + \\ & \vartheta_{12} \text{PUBLIC}_{it} + \vartheta_{13} \text{FOR}_{it} + \vartheta_{14} \text{GOV}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Ekspektasi hasil : H7 = $\vartheta_5 > 0$ atau $\vartheta_5 < 0$; H8 = $\vartheta_6 > 0$ atau $\vartheta_6 < 0$; H9 = $\vartheta_7 > 0$ atau $\vartheta_7 < 0$

(Model 3)

Dimana :

AUDLAY *Audit Delay* (selisih jumlah hari antara tahun tutup buku 31 Desember sampai dengan tanggal laporan audit)

SPEC_{it} Auditor Spesialisasi Industri (menggunakan *dummy* variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor spesialisasi industri, diberi nilai 0 jika lainnya)

DEKOM_{it} Efektifitas Dewan Komisaris (menggunakan *dummy* variabel, diberi nilai 1 jika nilai skala total skor lebih dari sama dengan median, diberi nilai 0 jika lainnya)

KOMDIT_{it} Efektifitas Komite Audit (menggunakan *dummy* variabel, diberi nilai 1 jika nilai skala total skor lebih dari sama dengan median, diberi nilai 0 jika lainnya)

PSAK_{it} Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) (menggunakan *dummy* variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan telah menerapkan PSAK 50/55, diberi nilai 0 jika belum menerapkan)

ROA_{it} Profitabilitas Bank diukur dengan rasio *Return on Assets* perusahaan i pada tahun t

SIZE _{it}	Ukuran Bank diukur dengan logaritma total aset yang dimiliki perusahaan <i>i</i> pada tahun <i>t</i>
NEWS _{it}	Perubahan Laba diukur sebagai selisih laba bersih bank periode <i>t</i> terhadap periode <i>t-1</i> relatif terhadap laba bersih periode <i>t-1</i>
KAP _{it}	Reputasi KAP (menggunakan <i>dummy</i> variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>BIG-4</i> , diberi nilai 0 jika lainnya)
PUBLIC _{it}	Status Bank (menggunakan <i>dummy</i> variabel, diberi nilai 1 jika perusahaan terdaftar di BEI, diberi nilai 0 jika tidak)
FOR _{it}	Bank Asing (menggunakan <i>dummy</i> variabel, diberi nilai 1 jika merupakan bank asing, diberi nilai 0 jika lainnya)
GOV _{it}	Bank Pemerintah (menggunakan <i>dummy</i> variabel, diberi nilai 1 jika bank pemerintah, diberi nilai 0 jika lainnya)

Tabel 3.1 Prediksi Pengaruh Variabel Independen Utama

Hipotesa	Variabel Independen Utama	Pengaruh Terhadap <i>Audit Delay</i>
Ha1	Auditor Spesialisasi Industri	Negatif
Ha2	Komite Audit	Negatif
Ha3	Dewan Komisaris	Negatif
Ha4	Penerapan PSAK 50/55	Positif
Ha5	Interaksi Auditor Spesialisasi Industri dengan Komite Audit	Negatif
Ha6	Interaksi Auditor Spesialisasi Industri dengan Dewan Komisaris	Negatif
Ha7	Interaksi Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan Auditor Spesialisasi Industri	Positif / Negatif
Ha8	Interaksi Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan Komite Audit	Positif / Negatif
Ha9	Interaksi Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan Dewan Komisaris	Positif / Negatif

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel–variabel yang akan diteliti secara lebih dalam. Penjelasan disini meliputi definisi, indikator variabel, dan pengukuran variabel. Adapun variabel-variabel tersebut dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu :

3.4.1 *Audit Delay* (AUDLAY)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sekaran, 2010 : 70). Variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu *audit delay* yaitu lamanya hari sejak tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Subekti dan Widiyanti, 2004). Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari.

3.4.2 Variabel Bebas Utama

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sekaran, 2010:72). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Auditor Spesialisasi Industri (SPEC)

Nilai auditor spesialisasi industri dihitung dengan menggunakan *dummy variable*. Angka 1 akan diberi untuk auditor yang memiliki spesialisasi industri dan angka 0 untuk auditor yang tidak memiliki spesialisasi industri.

Pengukuran auditor spesialisasi industri pada penelitian ini mengacu pada Gul, Fung, & Jaggi (2009). Auditor spesialisasi industri diidentifikasi dengan persentase total aset dari klien yang diaudit oleh suatu KAP di suatu industri.

$$SPEC = \frac{\text{Jumlah Klien KAP dalam Industri}}{\text{Jumlah Seluruh Emiten dalam Industri}} \times \frac{\text{Rerata Aset Klien KAP dalam Industri}}{\text{Rerata Aset Seluruh Emiten dalam Industri}}$$

Auditor yang dianggap auditor spesialisasi industri apabila dari hasil perhitungan rumus diatas jumlah SPEC lebih besar dari 30 persen (Reichelt dan Wang, 2009).

2. Efektifitas Dewan Komisaris (DEKOM)

Dewan Komisaris sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* pada penelitian kali ini juga dinilai dengan menggunakan skor. Karakteristik yang dinilai untuk dewan komisaris yaitu independensi, aktivitas, size, dan kompetensi. Metode pengukuran yang digunakan untuk menilai dewan komisaris penilaian merupakan replikasi dari penilaian yang digunakan pada penelitian Ancella (2009) yang disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Setiap pertanyaan terdapat tiga kemungkinan penilaian yaitu *Good*, *Fair*, dan *Poor* atau dua kemungkinan yaitu *Good and Poor* atau bisa juga *Good and Fair*. Untuk setiap nilai *Good* diberi nilai 3, *Fair* diberi nilai 2, dan *Poor* diberi nilai 1. Untuk pertanyaan yang informasinya tidak tersedia di laporan tahunan perusahaan maka diberi nilai *Poor* atau 1. Item indeks penilaian dituangkan pada dalam lampiran 1.

3. Efektifitas Komite Audit (KOMDIT)

Komite audit sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* pada penelitian kali ini dinilai dengan menggunakan skor. Karakteristik yang diukur dalam perhitungan skor komite audit antara lain mencakup aktivitas, jumlah anggota (*size*), kompetensi, dan independensi. Sama dengan dewan komisaris, metode penilaian merupakan replikasi dari penilaian yang digunakan pada penelitian Ancella (2009) yang disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dalam kuisisioner IICD, untuk setiap pertanyaan terdapat tiga kemungkinan penilaian yaitu *Good*, *Fair*, dan *Poor* atau dua kemungkinan yaitu *Good and Poor* atau bisa juga *Good and*

Fair. Untuk setiap nilai *Good* diberi nilai 3, *Fair* diberi nilai 2, dan *Poor* diberi nilai 1. Untuk pertanyaan yang informasinya tidak tersedia di laporan tahunan perusahaan maka diberi nilai *Poor* atau 1. Item indeks penilaian dituangkan dalam lampiran 1.

4. Penerapan PSAK 50/55 revisi 2006 (PSAK)

Habib dan Bhuiyan (2011) dalam penelitiannya menggunakan *dummy* tahun, bernilai 1 diberikan pada tahun setelah penerapan IFRS dan bernilai 0 apabila sebaliknya. Tujuannya adalah melihat perubahan ARL sebelum dan sesudah implementasi IFRS.

Penerapan PSAK 50/55 diukur dengan menggunakan *dummy variable*. Angka 1 untuk Bank yang telah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan angka 0 untuk yang belum menerapkan. Penerapan PSAK 50/55 revisi 2006 merupakan implementasi dari konvergensi IFRS. Menurut Marden dan Brackney (2009), pengadopsian IFRS akan meningkatkan resiko audit, karena auditor harus melakukan verifikasi atas penilaian manajerial yang meningkat akibat adanya pendekatan penetapan standar berbasis prinsip. Dengan demikian penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) diperkirakan memiliki pengaruh secara positif terhadap *audit delay*.

3.4.3 Variabel Kontrol

1. Profitabilitas Bank (ROA)

Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *audit delay* (Owusu-Ansah, 2000; Wirakusuma, 2004; Subekti dan Widiyanti, 2004) profitabilitas perusahaan diprediksi memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. ROA merupakan besarnya persentase pengembalian laba bersih terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Adapun formula yang digunakan adalah :

$$ROA = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Ukuran Bank (SIZE)

Ukuran Bank adalah ukuran perusahaan dinyatakan dalam logaritma total aset yang dimiliki oleh Bank. Ukuran bank diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan, baik negatif ataupun positif terhadap *audit delay*. Perusahaan besar cenderung mempunyai kontrol internal yang lebih ketat, sehingga memudahkan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yang kemudian dapat mengurangi jangka waktu penyelesaian audit. Sebaliknya, Boynton dan Kell (1996) dalam Halim (2000) menyebutkan *audit delay* akan semakin lama apabila ukuran perusahaan semakin besar. Hal ini karena auditor harus menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan prosedur audit yang dilakukan semakin luas.

3. Perubahan Laba (NEWS)

Perubahan laba diukur melalui selisih laba bersih periode t terhadap lababersih periode $t-1$ relatif terhadap laba bersih periode $t-1$. Menurut Lee *et al.* (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perubahan laba diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini karena perusahaan ingin mengumumkan keuntungan lebih cepat kepada publik, sehingga mendorong auditor untuk menyelesaikan audit dengan cepat.

4. Reputasi KAP (KAP)

Pada penelitian ini, variabel reputasi kantor akuntan publik (KAP) diklasifikasikan menjadi dua yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *Non Big Four*. Menurut Schwartz dan Soo (1996) dalam Lee dan Jahng (2008) KAP dalam kelompok *Big Four* cenderung memiliki akses teknologi yang lebih maju dan juga staf-staf yang lebih kompeten dibandingkan dengan *Non-Big Four*, sehingga dapat melakukan proses audit lebih cepat. Dengan demikian diperkirakan KAP *Big Four* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Untuk KAP *Big Four* diberi kode dummy 1 dan KAP *Non Big Four* diberi kode dummy 0.

5. Status Bank (PUBLIC)

Status Bank diukur dengan menggunakan *dummy variable*. Angka 1 untuk Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan angka 0 untuk yang tidak terdaftar. Status bank sebagai perusahaan terbuka mengakibatkan perusahaan tidak hanya harus mematuhi peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, tetapi juga peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM – LK Nomor Kep-06/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Dengan demikian status bank yang terdaftar di BEI diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

6. Bank Asing (FOR)

Bank asing diukur dengan menggunakan *dummy variable*. Angka 1 untuk bank asing dan angka 0 untuk yang bukan bank asing. Menurut Bamber *et al.* (1993) dalam Habib, A. & Bhuiyan, U. B. (2011) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan, dalam hal ini semakin luas saham klien yang dipegang investor individu maka semakin banyak yang mengandalkan laporan keuangan klien. Sebagian besar bank asing yang ada di Indonesia merupakan *branch* dari bank yang beroperasi di negara asalnya, oleh karena itu konsentrasi kepemilikan saham biasanya tidak meluas. Dengan demikian diperkirakan bank asing memiliki pengaruh secara positif terhadap *audit delay*.

7. Bank Pemerintah (GOV)

Bank pemerintah diukur dengan menggunakan *dummy variable*. Angka 1 untuk bank milik pemerintah dan angka 0 untuk bank bukan milik pemerintah. Short dan Keasey (1999) menyatakan bahwa terdapat hubungan *non linear* antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan di Inggris, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Akan tetapi dilain sisi dalam kaitannya dengan *audit delay*, bank pemerintah cenderung lebih mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan

perbankan, baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit pada bank pemerintah. Dengan demikian diperkirakan bank pemerintah memiliki pengaruh secara positif terhadap *audit delay*.

Tabel 3.2 Prediksi Pengaruh Variable Kontrol

Variabel	Pengaruh Terhadap <i>Audit Delay</i>
Profitabilitas Bank	Negatif
Ukuran Bank	Negatif/Positif
Perubahan Laba	Negatif
Reputasi KAP	Negatif
Status Bank	Negatif
Bank Asing	Positif
Bank Pemerintah	Positif

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif dimana teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik dalam menganalisis data yang dilakukan pada sampel untuk kemudian dibuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi (Sugiyono, 2008 : 207). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model regresi linear berganda sehingga harus dilakukan uji *Best Linear Unbiasedness Estimator* atau biasa disebut uji *BLUE* (Nachrowi dan Usman, 2005). Uji *BLUE* yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang

berbentuk simetris. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan : (1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2000 : 212).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu ada hubungan linier yang pasti antara variabel bebasnya (*independent*). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat apakah *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 atau nilai *tolerance* diatas di atas 0,1 (Purwoto & Wahyuni , 2009 : 127-131). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,1$, maka H_a ditolak (ada multikolinearitas).
2. Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* > 0.1 , maka H_a diterima (tidak ada multikolinearitas).

3. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross*

section (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yakni Uji Durbin-Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang akan diuji adalah :

1. H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
2. H_a : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : jika nilai durbin watson diperoleh sebesar 2 (mendekati 2), maka diasumsikan tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif. Jika nilai Durbin Watson antara 1,5 – 2 maka masih dalam batas toleransi. Sedangkan jika nilai Durbin Watson di bawah 1,5 berarti terjadi autokorelasi sehingga data harus ditinjau ulang karena tidak bisa dipakai untuk analisis lebih lanjut Gujarati (1997:217).

4. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya tidak kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di *studentized* (Santoso, 2000 : 210). Dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain metode diatas, terdapat metode pengujian dengan menggunakan uji *white*. Pada uji *white* apabila probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-square} > \alpha$, maka tidak terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan metode regresi berganda yang bertujuan untuk mengukur apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti, apakah hipotesis yang dibuat tersebut diterima atau ditolak. Langkah-langkah pengujian hipotesis aalah sebagai berikut.

1. Uji Ketepatan Perkiraan Model (Analisis Determinasi)

Menurut Ghozali (2009), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Satu hal yang perlu dicatat adalah masalah regresi lancung (*spurious regression*). Menurut Insukindro (1998) dalam Ghozali (2009), menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Dalam kenyataan nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2009) menjelaskan, jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-k)/(n-k)$, Jika $k > 1$ maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Metode uji analisa lainnya adalah uji statistik secara *multivariate* yang dikerjakan dengan uji F. Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi statistik pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Hipotesis :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, dan

penerapan PSAK (revisi 2006) secara bersama-sama terhadap *audit delay*.

2. H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) secara bersama-sama terhadap *audit delay*.

F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

- R^2 = Koefisien Determinasi
- n = Jumlah data atau kasus
- k = Jumlah variabel independen

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $F > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh atau dengan kata lain H_0 diterima.
2. Jika tingkat signifikansi $F < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain H_0 ditolak.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan secara

univariate. Proses statistik secara *univariate* ini menggunakan metode t-test dengan taraf signifikansi 5%.

Hipotesis :

1. **H₀** : Secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan antara auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*.
2. **H_a** : Secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*.

t hitung dalam analisis regresi dapat dicari dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{bi}{Sbi}$$

Keterangan :

bi : Koefisien regresi variabel i

Sbi : Standar error variabel i

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t > 0.05$ maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain H_0 diterima.
2. Jika nilai signifikansi $t < 0.05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain H_0 ditolak.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada bulan Februari 2012, observasi dan pengamatan telah dilaksanakan terhadap 49 perusahaan dari 122 perusahaan perbankan yang ada di Indonesia periode 2010 dengan jumlah sampel sebesar 89 perusahaan perbankan periode pengamatan sebanyak dua tahun (2009-2010), dimana pengamatan pada objek penelitian ini dilakukan dengan meneliti laporan keuangan dan *annual report* perusahaan perbankan yang telah diaudit. Kajian penelitian dilakukan dengan mengamati pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia periode 2009-2010. Tabel 4.1 menunjukkan proses pemilihan sampel.

Tabel 4.1 Dasar Pemilihan Sampel

Deskripsi	Jumlah
Bank umum yang terdaftar tahun 2010	122
Bank umum syariah	(11)
Bank umum konvensional yang terdaftar tahun 2010	111
Bank dengan tanggal neraca selain 31 Desember	-
Bank dengan mata uang pelaporan selain rupiah	-
Bank dengan data tidak lengkap	(59)
Bank yang teridentifikasi sebagai <i>outlier</i>	(3)
Bank Sampel	49
Observasi sampel (tahun 2009-2010)	89

Sumber : Data diolah

Diperoleh sampel final sebanyak 49 bank atau 89 observasi pada tahun 2009 sampai 2010. Sampel final tersebut diperoleh setelah dilakukan pengeluaran data *outlier* dengan mengeluarkan observasi pada sampel yang berada di luar simpang garis residual plot yang merupakan hasil olah data dari program *evIEWS* 5.0. Komposisi sampel berdasarkan klasifikasi bank dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Klasifikasi Bank

No.	Klasifikasi Bank	Jumlah Observasi	%
1.	Bank Persero	8	8.99
2.	Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa	41	46.07
3.	BUSN Non-devisa	6	6.74
4.	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	15	16.85
5.	Bank Campuran	7	7.87
6.	Bank Asing	12	13.48
	Total	89	100%

Sumber : Data diolah

Bank persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank umum swasta nasional adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Bank swasta dibedakan menjadi dua yaitu bank umum swasta nasional devisa dan bank umum swasta nasional non-devisa. Bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Sedangkan bank asing adalah bank umum yang didirikan oleh pihak asing dan beroperasi di Indonesia melalui kantor cabang.

Komposisi Bank yang *go public* pada tahun 2009 yaitu 60.47% dan pada tahun 2010 yaitu 61.22%. Terlihat pada tabel 4.2 terlihat bahwa proporsi terbesar pada sampel penelitian adalah Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, yaitu sebesar 46.07%. Dari keseluruhan populasi bank umum di Indonesia per 31 Desember 2010, jumlah BUSN Devisa memiliki populasi yang cukup besar yaitu

mencapai 30% (Laporan Pertanggungjawaban Perbankan, 2010), sehingga proporsi BUSN Devisa dalam observasi dinilai wajar. Proporsi terbesar kedua yaitu Bank Pembangunan Daerah yaitu sebesar 16.85%.

Meskipun jumlah BUSN Non-devisa berada pada posisi terbesar kedua di dalam populasi bank umum yang ada di Indonesia dengan persentase 26%, akan tetapi dalam penelitian ini BUSN Non-devisa memiliki proporsi terkecil dibandingkan kelompok bank lainnya, yaitu sebesar 6.74%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan data dari BUSN Non-devisa.

4.2 Statistik Deskriptif Hasil Skor Efektifitas Dewan Komisaris

Variabel dewan komisaris diukur dengan melakukan skor atas aspek independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi untuk menilai efektifitasnya. Terdapat 14 item *scoring* untuk mengukur efektifitas dewan komisaris yang digolongkan kedalam 4 aspek. Tabel 4.3 menunjukkan statistik deskriptif atas skor efektifitas dewan komisaris.

Tabel 4.3
Analisis Statistik Deskriptif
Efektifitas Dewan Komisaris

Aspek	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
Independensi	1.00	3.00	2.35	0.8396
Aktivitas	1.00	3.00	2.51	0.8015
Size	1.00	3.00	1.83	0.9913
Kompetensi	1.00	3.00	2.77	0.5401
Total Rerata skor			9.46	
Ket : Penjelasan aspek <i>scoring</i> dapat dilihat pada lampiran				

Sumber : Hasil run SPSS 16.0

Dari keempat aspek diatas, terlihat bahwa rata-rata pada aspek size merupakan aspek dengan nilai terendah dan berada dibawah nilai *fair* yaitu 1.87. Kemudian aspek dengan rata-rata paling tinggi adalah aspek kompetensi dengan nilai diatas nilai *fair* yaitu 2.77.

Dari aspek independensi, rata-rata jumlah proporsi komisaris independen pada bank sampel telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu diatas 50%,

dan rata-rata bank sampel telah mengungkapkan definisi independen untuk komisaris independen pada laporan tahunan. Disamping itu, rata-rata dewan komisaris pada bank sampel memiliki masa menjabat di bawah 5 tahun. Dilihat dari aspek aktivitas, rata-rata dewan komisaris pada bank sampel melakukan rapat lebih dari 4 kali dalam satu tahun dengan tingkat kehadiran yang cukup baik. Rata-rata dewan komisaris bank sampel juga melakukan evaluasi atas laporan keuangan, kinerja manajemen, dan kebijakan strategis perusahaan.

Dari aspek *size*, rata-rata dewan komisaris pada bank sampel tidak cukup baik. Beberapa bank memiliki jumlah dewan komisaris lebih dari 15 orang atau kurang dari 5 orang. Dilihat dari aspek kompetensi, rata-rata dewan komisaris pada bank sampel telah memiliki kompetensi pengetahuan dibidang keuangan, akuntansi, dan perbankan. Disamping itu, rata-rata umur dari dewan komisaris pada bank sampel berada diatas 40 tahun. Penjelasan ini berdasarkan tabel statistik deskriptif yang lebih rinci pada lampiran 23.

Skor dewan komisaris secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 9.46, yang berarti diatas nilai *Fair* yaitu 8 (4 kategori dikalikan dengan nilai 2). Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas dewan komisaris pada penelitian secara rata-rata sudah cukup baik, karena rata-rata telah mencapai di atas nilai *Fair* pada seluruh kategori aspek dewan komisaris. Adanya aturan yang ketat mengenai *good corporate governance* membuat perusahaan bank sampel memiliki rata-rata efektifitas dewan komisaris yang baik.

4.3 Statistik Deskriptif Hasil Skor Efektifitas Komite Audit

Variabel komite audit diukur dengan melakukan skor atas aspek aktivitas, jumlah anggota, kompetensi, dan independensi untuk menilai efektifitasnya. Terdapat 8 item *scoring* untuk mengukur efektifitas komite audit yang digolongkan kedalam 4 aspek. Tabel 4.4 menunjukkan statistik deskriptif atas skor efektifitas komite audit.

Dari keempat aspek, terlihat bahwa rata-rata pada aspek aktivitas merupakan aspek dengan nilai terendah dengan nilai 2.18. Kemudian aspek dengan rata-rata paling tinggi adalah aspek independensi dengan nilai 2.91.

Tabel 4.4
Analisis Statistik Deskriptif
Efektifitas Komite Audit

Aspek	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
Aktivitas	1.00	3.00	2.18	0.8643
<i>Size</i>	1.00	3.00	2.45	0.5438
Kompetensi	1.00	3.00	2.68	0.5696
Independensi	1.00	3.00	2.91	0.4167
Total Rerata skor			10.22	
Ket : Penjelasan aspek <i>scoring</i> dapat dilihat pada lampiran				

Sumber : Hasil run SPSS 16.0

Dari aspek aktivitas, rata-rata komite audit pada bank sampel telah melakukan rapat sebanyak lebih dari 4 kali dalam satu tahun dengan tingkat kehadiran yang cukup baik. Dilihat dari aspek *size*, rata-rata komite audit dari bank sampel tidak cukup baik karena masih ada beberapa bank sampel yang memiliki jumlah anggota komite audit kurang dari 3 orang.

Dari aspek kompetensi, rata-rata bank sampel komite auditnya memiliki anggota yang berlatar belakang akuntansi dan perbankan. Disamping itu rata-rata umur anggota komite audit pada bank sampel lebih dari 40 tahun. Dilihat dari aspek independensi, rata-rata bank sampel memiliki anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen dan pihak independen. Penjelasan ini berdasarkan tabel statistik deskriptif yang lebih rinci pada lampiran 24.

Skor komite audit secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 10.22, yang berarti di atas nilai *Fair* yaitu 8 (4 kategori dikalikan dengan nilai 2). Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas komite audit pada penelitian secara rata-rata sudah cukup baik, karena rata-rata telah mencapai di atas nilai *Fair* pada seluruh kategori aspek komite audit. Sama halnya dengan dewan komisaris, komite audit juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia, sehingga hal inilah yang diduga membuat komite audit pada bank sampel rata-rata memiliki efektifitas yang baik.

4.4 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan penilaian dengan *scoring* untuk menilai efektifitas komite audit dan dewan komisaris, kemudian dilakukan uji *cronbach's alpha* untuk melihat reliabilitas atas kriteria *scoring*. Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari uji *cronbach's alpha* untuk variabel komite audit dan dewan komisaris.

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N
Komite Audit	0.551	8
Dewan Komisaris	0.656	14

Sumber : Hasil run SPSS 16.0

Terlihat bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel komite audit dan dewan komisaris berada diatas 0.5. Menurut Nunnaly (1994) dan Ghozali (2001) instrumen untuk mengukur tiap-tiap variabel dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0.5. Berdasarkan kedua referensi tersebut maka kriteria *scoring* untuk variabel komite audit dan dewan komisaris dalam penelitian ini dianggap reliabel.

4.5 Statistik Deskriptif Seluruh Variabel

Variabel-variable yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebagai variabel independen utama dan juga profitabilitas, ukuran bank, perubahan laba, reputasi KAP, status bank, bank asing, dan bank pemerintah sebagai variabel kontrol. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif sampel penelitian.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *audit delay* adalah antara 26 hari hingga 120 hari dengan rata-rata sebesar 73.88 hari dan standar deviasi sebesar 21.9187 hari. Terlihat bahwa rata-rata *audit delay* perusahaan sampel masih dibawah 90 hari kalender yang merupakan batas yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK dalam penyampaian laporan keuangan atau tanggal 31 Maret

pada tiap tahunnya. Terlihat juga bahwa terdapat perusahaan yang terlambat karena mempunyai *audit delay* diatas 90 hari.

Rata-rata *audit delay* dalam penelitian ini lebih kecil ketimbang penelitian Halim (2000) yang memperoleh hasil 84.50 hari, Wirakusuma (2004) sebesar 99.92 hari, Rachmawati (2008) sebesar 76.63 hari, serta Subekti dan Widiyanti (2004) sejumlah 93.38 hari. *Audit delay* tercepat yaitu 26 hari, dialami tahun 2010 oleh Bank NISP. Sedangkan *audit delay* terlama yaitu 120 hari, dialami Bank Mutiara pada tahun 2009.

Tabel 4.6
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
ROA	89	-5.68	4.48	1.40	1.2401
SIZE (000.000)	89	846.361	449.774.551	50.170.980	96.270.660
NEWS	89	-1.09	9.94	0.81	1.9266
AUDLAY	89	26.00	120.00	73.88	21.9187
Variabel	N	Proporsi Dummy 1	Proporsi Dummy 0		
KAP	89	56 %	44 %		
PUBLIC	89	63 %	37 %		
FOR	89	12 %	88 %		
GOV	89	27 %	73 %		
SPEC	89	18 %	82 %		
DEKOM	89	52 %	48 %		
KOMDIT	89	55 %	45 %		
PSAK	89	51 %	49 %		

Keterangan : **ROA** = *Return on Assets*, % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; **SIZE** = ukuran bank; **NEWS** = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; **KAP** = *dummy* KAP *Big-4*, bernilai 1 untuk KAP *Big-4*, 0 apabila sebaliknya; **PUBLIC** = *dummy* status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; **PSAK** = *dummy* penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; **FOR** = *dummy* bank kepemilikan asing, bernilai 1 untuk bank kepemilikan asing, 0 apabila sebaliknya; **GOV** = *dummy* bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; **SPEC** = *dummy auditor specialization industry*, bernilai 1 untuk *auditor specialization industry*, apabila sebaliknya; **DEKOM** = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan *dummy*, bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; **KOMDIT** = skor efektifitas komite audit yang dijadikan *dummy*, bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; **AUDLAY** = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.

Sumber : Hasil run SPSS 16.0

18% dari bank sampel laporan keuangannya diaudit oleh auditor spesialisasi industri selama tahun 2009 sampai dengan 2010, 82% sisanya diaudit

oleh auditor non-spesialisasi industri. Hal ini berarti hanya sebagian kecil dari bank sampel yang menggunakan jasa auditor spesialisasi industri.

Selama jangka tahun penelitian, terapat 55% bank yang memiliki efektifitas komite audit yang baik (diatas median) dari bank yang dijadikan sampel. Hal ini menggambarkan hanya separuh lebih proporsi dari bank sampel yang dianggap memiliki efektifitas komite audit yang baik walaupun telah terdapat regulasi yang ketat atas penerapan tata kelola perusahaan pada industri perbankan. Sulitnya persetujuan atas penunjukkan anggota komite audit yang kompeten diduga menjadi penyebab dari hal tersebut.

Terlihat bahwa hanya 52% dari bank sampel yang memiliki efektifitas dewan komisaris yang baik (diatas median) dari bank yang dijadikan sampel. Sama halnya dengan komite audit, dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang diatur secara ketat pada industri perbankan, akan tetapi hanya separuh proporsi dari bank sampel yang dianggap memiliki efektifitas dewan komisaris yang baik. Dari hasil pengamatan laporan tahunan, hal ini mungkin disebabkan karena ada beberapa bank yang anggota dewan komisarisnya masih belum disetujui oleh Bank Indonesia.

Rerata penerapan PSAK 50/55 revisi 2006 (Variabel PSAK) yang dimulai per atau setelah tanggal 1 Januari 2010 telah dilakukan oleh 51% dari keseluruhan bank sampel selama rentang tahun penelitian. Namun, di tahun 2010 hampir seluruh bank yang dijadikan sampel telah menerapkan PSAK 50/55 (Revisi 2006), kecuali dua bank, yakni Bank Ina dan Bank Pembangunan Daerah DIY. Ketidaksiapan sumber daya perusahaan diperkirakan sebagai faktor yang menyebabkan belum dapat diterapkannya PSAK 50/55 (Revisi 2006) secara menyeluruh.

Rasio profitabilitas (ROA) berkisar antara -5.68 sampai dengan 4.48 dengan rata-rata sebesar 1.40 dan standar deviasi sebesar 1.24. Nilai yang negatif berarti perusahaan mengalami kerugian, berarti terdapat perusahaan yang mengalami kerugian hingga 5.68 % dibandingkan total aktivasnya. Rata-rata sampel mendapatkan profitabilitas sampai dengan 1.4 % dibandingkan total aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas tertinggi dimiliki oleh Bank NTB pada tahun

2010, sementara rasio terendah terjadi tahun 2010 pada Bank Eksekutif Internasional Tbk..

Ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur dengan total aset mempunyai rentang nilai antara 846 milyar sampai dengan 450 trilyun dengan rata-rata sebesar 50.17 trilyun dan standar deviasi sebesar 92.27 trilyun. Ukuran perusahaan maksimum dimiliki oleh Bank Mandiri Tbk pada tahun 2010, sementara ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh Bank Ina pada tahun 2009. Terlihat bahwa nilai standar deviasi bank sampel lebih besar dari rata-ratanya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank sampel terdistribusi dalam berbagai ukuran, kecil, menengah, hingga besar. Walaupun tidak terdapat batas nominal total aset, rentang nilai tersebut menunjukkan bank sampel pada penelitian ini tidak hanya didominasi oleh bank-bank berukuran besar.

Variabel NEWS yang merupakan proksi rasio laba bersih bank tahun t relatif terhadap laba bersih tahun $t-1$, memperlihatkan adanya bank yang mengalami kerugian dalam rentang tahun penelitian yang dilihat dari nilai minimum variabel NEWS sebesar -1.09. Namun secara rata-rata bank sampel memperoleh laba bersih yang meningkat dengan rasio 0.81 dibandingkan periode sebelumnya.

Dari 89 sampel penelitian ini, variabel KAP menunjukkan terdapat 56% perusahaan yang diperiksa oleh akuntan publik yang memiliki ikatan hubungan internasional atau yang lebih dikenal sebagai *big four* dan sisanya sebesar 44% diperiksa oleh *non big four*. Hal ini menunjukkan bahwa separuh lebih sampel penelitian menggunakan akuntan *big four* untuk memeriksa laporan keuangan perusahaannya. Industri perbankan yang memiliki karakteristik *highly-regulated* diduga menjadi penyebab sebagian besar bank sampel memilih KAP *big four*.

Rerata yang ditunjukkan oleh variabel PUBLIC adalah sebesar 0.63. Hal ini menunjukkan bahwa 63% dari keseluruhan sampel penelitian adalah bank umum konvensional yang kepemilikan sahamnya telah diperdagangkan kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Rerata variabel FOR pada Tabel 4.1 adalah sebesar 0.12 yang berarti hanya 12% dari keseluruhan sampel penelitian merupakan bank umum konvensional milik asing.

Sedangkan 27% dari sampel merupakan bank umum konvensional milik pemerintah.

4.6 Uji Korelasi Bivariate

Uji korelasi pearson dilakukan untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel. Korelasi dapat dilihat menggunakan skala yang berkisar antara -1 sampai +1. Korelasi 0 menunjukkan tidak ada hubungan antar variabel. -1 berarti terdapat korelasi negative sempurna dan +1 menunjukkan adanya korelatif positif sempurna. Berikut ini adalah analisis dari tabel *Pearson Correlation*.

Terdapat korelasi positif antara variabel perubahan laba dan bank asing dengan *audit delay*. Hal ini berarti semakin besar perubahan labanya maka *audit delay* semakin panjang. Disamping itu apabila bank tersebut adalah bank asing biasanya juga memiliki *audit delay* yang lebih panjang.

Terdapat korelasi negatif antara variabel ukuran perusahaan, status bank, bank pemerintah, komite audit, dan dewan komisaris dengan *audit delay*. Dengan demikian, bank berukuran besar dengan status terbuka yang juga memiliki komite audit dan dewan komisaris yang baik biasanya memiliki *audit delay* yang lebih pendek. Disamping itu apabila bank tersebut merupakan bank pemerintah biasanya juga memiliki *audit delay* yang lebih pendek.

Terdapat korelasi positif antara variabel auditor spesialisasi industri dengan variabel reputasi KAP, status bank, bank pemerintah, perubahan laba, dan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi industri biasanya adalah kantor akuntan *Big Four*.

Disamping itu, bank dengan status terbuka, bank pemerintah, bank dengan perubahan laba yang besar, dan bank dengan aset yang besar biasanya diaudit oleh auditor spesialisasi industri.

Terdapat korelasi positif antara variabel dewan komisaris dan komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki dewan komisaris yang baik biasanya komite auditnya juga baik. Korelasi antara dewan komisaris dan komite audit dengan profitabilitas menunjukkan hubungan positif. Hal ini berarti bank yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya mempunyai efektifitas komite audit dan dewan komisaris yang baik.

Tabel 4.7 Pearson Correlation

Pearson Correlation	AUDLAY	ROA	SIZE	NEWS	KAP	PUBLIC	PSAK	FOR	GOV	SPEC	KOMDIT	DEKOM
	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.	corr.
AUDLAY	1	0.084	-0.307*	0.266*	0.036	-0.31*	0.147	0.453*	-0.206*	0.024	-0.359*	-0.404*
ROA	0.084	1	0.133	-0.116	0.058	-0.267*	0	-0.024	0.348*	-0.014	0.174	0.186*
SIZE	-0.307*	0.133	1	-0.02	0.525*	0.435*	0.083	-0.245*	0.287*	0.468*	0.542*	0.361*
NEWS	0.266*	-0.116	-0.02	1	0.103	-0.044	0.099	0.237*	-0.135	0.219*	-0.01	-0.099
KAP	0.036	0.058	0.525*	0.103	1	0.213*	0.033	0.194*	-0.127	0.413*	0.386*	0.188*
PUBLIC	-0.31*	-0.267*	0.435*	-0.044	0.213*	1	0.125	-0.489*	-0.267*	0.178*	0.195*	0.189*
PSAK	0.147	0	0.083	0.099	0.033	0.125	1	0.03	-0.057	0.053	0.055	0.033
FOR	0.453*	-0.024	-0.245*	0.237*	0.194*	-0.489*	0.03	1	-0.228*	0.002	-0.141	-0.32*
GOV	-0.206*	0.348*	0.287*	-0.135	-0.127	-0.267*	-0.057	-0.228*	1	0.177*	0.244*	0.182*
SPEC	0.024	-0.014	0.468*	0.219*	0.413*	0.178*	0.053	0.002	0.177*	1	0.247*	0.277*
KOMDIT	-0.359*	0.174	0.542*	-0.01	0.386*	0.195*	0.055	-0.141	0.244*	0.247*	1	0.392*
DEKOM	-0.404*	0.186*	0.361*	-0.099	0.188*	0.189*	0.033	-0.32*	0.182*	0.277*	0.392*	1

* menotasikan tingkat signifikansi alpha 5 %

Sumber : Hasil run SPSS 16.0

Terdapat korelasi positif antara variabel komite audit dengan ukuran perusahaan, reputasi KAP, bank pemerintah, auditor spesialisasi industri, dan status bank. Hal ini menunjukkan bank yang memiliki komite audit yang baik biasanya memilih jasa audit dari kantor akuntan *Big Four* dan auditor spesialisasi industri. Disamping itu bank dengan ukuran yang besar, bank pemerintah, dan bank yang berstatus terbuka biasanya memiliki komite audit yang baik.

Terdapat korelasi positif antara variabel dewan komisaris dengan ukuran perusahaan, bank pemerintah, auditor spesialisasi industri, status bank, bank asing, dan reputasi KAP. Hal ini berarti bank milik pemerintah, bank dengan ukuran besar, bank berstatus terbuka, dan bank asing biasanya memiliki dewan komisaris yang baik. Disamping itu bank yang memiliki dewan komisaris yang baik biasanya diaudit oleh kantor akuntan *Big-4* dan auditor spesialisasi industri.

Terdapat korelasi positif sebesar antara variabel bank pemerintah dan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bank pemerintah memiliki total aset yang lebih besar. Terdapat korelasi positif antara variabel status bank dan reputasi KAP. Dengan demikian bank yang berstatus terbuka biasanya menggunakan jasa audit dari kantor akuntan *Big Four*.

4.7 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

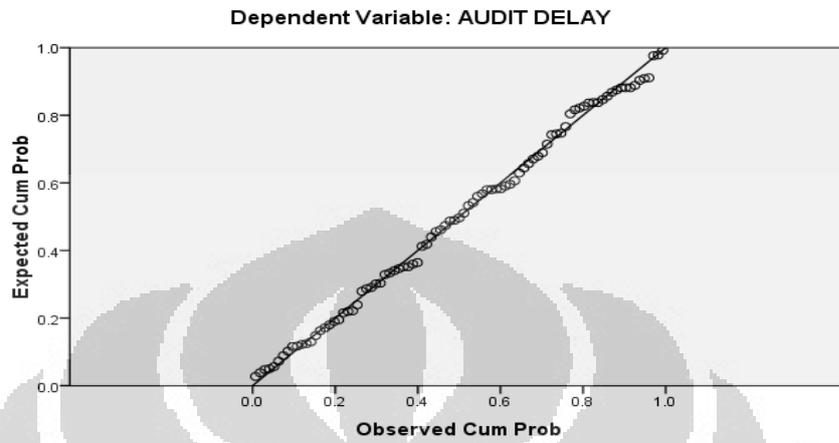
Analisis regresi linear berganda memerlukan beberapa asumsi agar model tersebut layak dipergunakan. Asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dari hasil pengolahan data SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

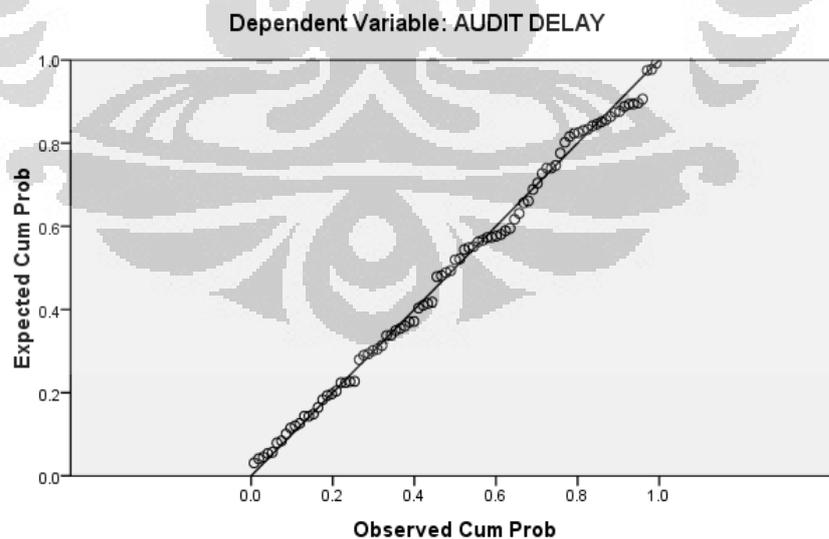
Gambar 4.1
Uji Normalitas Model 1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

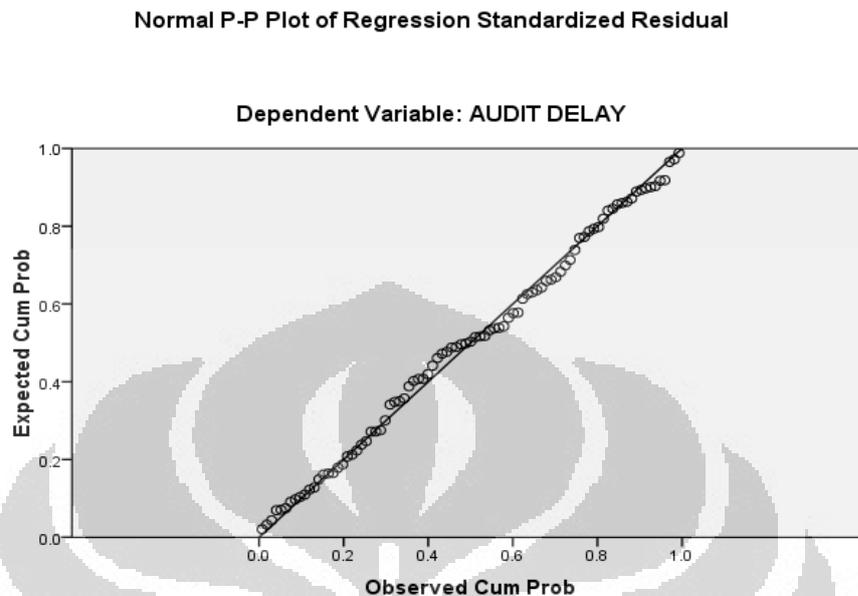


Gambar 4.2
Uji Normalitas Model 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3
Uji Normalitas Model 3



Menurut Singgih Santoso (2000 : 214) dalam bukunya yang berjudul Statistik Parametrik menyatakan dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan ketiga grafik di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi

ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian Durbin-Watson (dw). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam analisis regresi linier berganda, maka dilakukan pengujian dengan uji Durbin Watson. Uji autokorelasi sangat disyaratkan pada data time series, namun untuk data crosssection juga dibutuhkan sebagai cross check terhadap pengujian lainnya. Gujarati (1997:217) berpendapat bahwa untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan aturan praktis sebagai berikut : jika nilai durbin watson diperoleh sebesar 2 (mendekati 2), maka diasumsikan tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif. Jika nilai Durbin Watson antara 1,5 – 2 maka masih dalam batas toleransi. Sedangkan jika nilai Durbin Watson di bawah 1,5 berarti terjadi autokorelasi sehingga data harus ditinjau ulang karena tidak bisa dipakai untuk analisis lebih lanjut. Peninjauan ini berupa menghapus data outliers (data yang diluar kewajaran).

Hasil pengujian autokorelasi dengan uji durbin Watson pada penelitian :

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.789
2	1.796
3	1.916

a. Predictors: (Constant), SPEC, KOMDIT, DEKOM, ROA, SIZE, NEWS, KAP, PUBLIC, PSAK, FOR, GOV

b. Dependent Variabel: *Audit delay*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS versi 16.0, nilai Durbin Watson masih dalam batas toleransi mendekati 2 yaitu sebesar 1.789 untuk model 1, 1.796 untuk model 2, dan 1.916 untuk model 3 hal ini berarti tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 atau tolerance di atas 0,1 (Purwoto & Wahyuni, 2009 : 127-131).

Tabel 4.9 menggambarkan semua nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 atau dengan kata lain tidak terdapat gejala multikolinearitas pada kedua model dalam penelitian ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Model 1		Model 2		Model 2	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
SPEC	0.637	1.569	0.147	6.821	0.32	3.126
DEKOM	0.708	1.412	0.667	1.498	0.382	2.619
KOMDIT	0.623	1.606	0.556	1.798	0.366	2.734
PSAK	0.956	1.046	0.929	1.077	0.371	2.698
SPEC*DEKOM			0.117	8.571		
SPEC*KOMDIT			0.12	8.312		
PSAK*SPEC					0.224	4.463
PSAK*DEKOM					0.348	2.874
PSAK*KOMDIT					0.238	4.206
ROA	0.769	1.3	0.767	1.304	0.758	1.318
SIZE	0.359	2.784	0.355	2.819	0.357	2.804
NEWS	0.86	1.163	0.837	1.195	0.821	1.217
KAP	0.498	2.008	0.495	2.022	0.495	2.019
PUBLIC	0.382	2.616	0.375	2.67	0.38	2.63
FOR	0.479	2.089	0.47	2.129	0.475	2.105
GOV	0.493	2.028	0.477	2.096	0.481	2.079

Sumber : data hasil output SPSS Versi 16.0

4. Uji Heteroskedastisitas

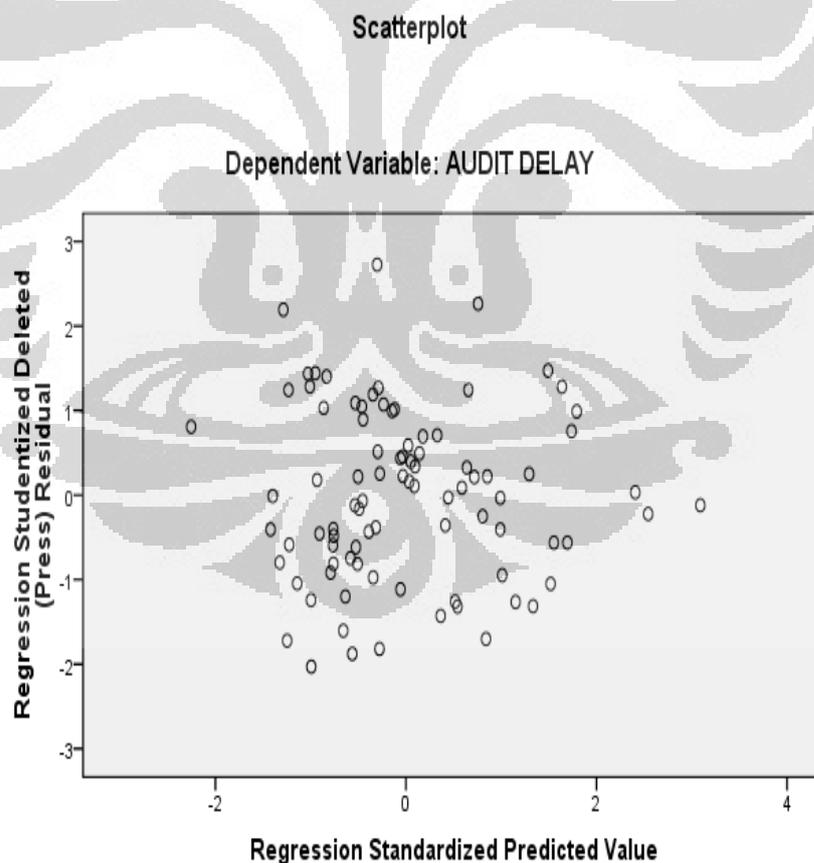
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SDRESID dengan ZPRED di mana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik.

Menurut Singgih Santoso (2000:210) dalam bukunya yang berjudul Statistik Parametrik menyatakan dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah :

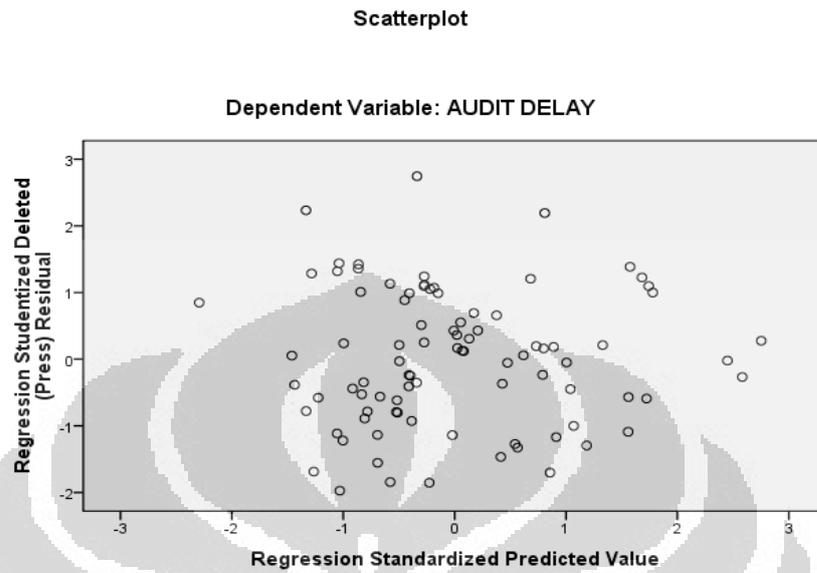
- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut adalah uji heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini :

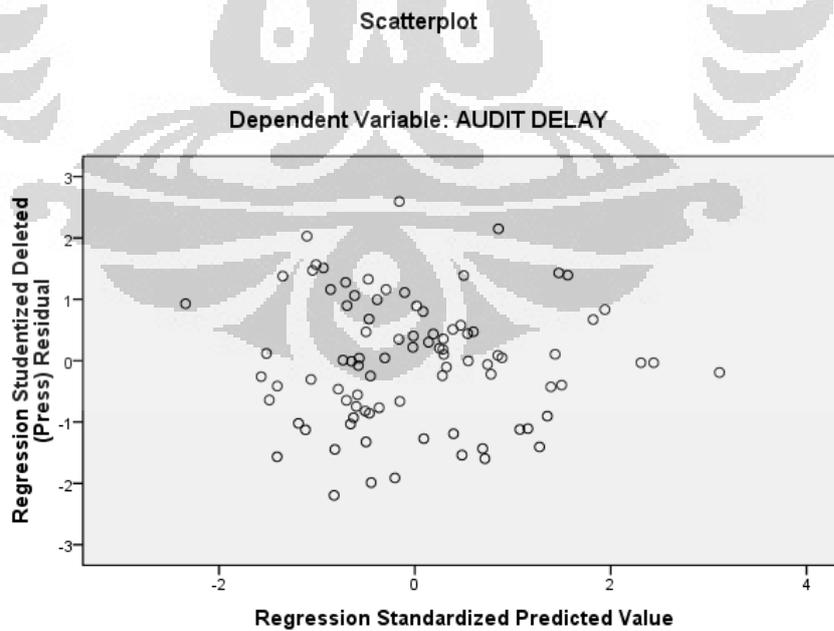
Gambar 4.4
Uji Heteroskedastisitas Model 1



Gambar 4.5
Uji Heteroskedatisitas Model 2



Gambar 4.6
Uji Heteroskedatisitas Model 3



Sumber : data hasil output SPSS Versi 16.0

Berdasarkan ketiga grafik diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Penelitian juga menggunakan uji *white*, berikut ini adalah tabel pengujian heteroskedastisitas melalui *white heterokedasticity test* :

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas Model 1

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.311621	Probability	0.237815
Obs*R-squared	70.09100	Probability	0.310830

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas Model 2

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.637981	Probability	0.842316
Obs*R-squared	11.05110	Probability	0.806320

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas Model 3

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.737021	Probability	0.768311
Obs*R-squared	15.01508	Probability	0.721639

Pada tabel uji *white* ketiga model diatas terlihat probabilitas Obs*R-squared memiliki nilai diatas 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas.

4.8 Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan meregresikan model penelitian. Berikut ini adalah hasil uji regresi linier berganda pada model 1, model 2, dan model 3.

4.8.1 Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Audit Delay

Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.380 pada model penelitian. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat relatif rendah yaitu hanya sebesar 38 persen. Masih terdapat 62 persen varians variabel terikat lainnya diluar model ini.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 1

$\text{AUDLAY}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{SPEC}_{it} + \alpha_2 \text{DEKOM}_{it} + \alpha_3 \text{KOMDIT}_{it} + \alpha_4 \text{PSAK}_{it} + \alpha_5 \text{ROA}_{it} + \alpha_6 \text{SIZE}_{it} + \alpha_7 \text{NEWS}_{it} + \alpha_8 \text{KAP}_{it} + \alpha_9 \text{PUBLIC}_{it} + \alpha_{10} \text{FOR}_{it} + \alpha_{11} \text{GOV}_{it} + \varepsilon_{it}$						
Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			135.497	2.594	0.011	
SPEC	H1 : -	+	10.235	1.715	0.09	**
DEKOM	H2 : -	-	-11.776	-2.706	0.008	*
KOMDIT	H3 : -	-	-10.443	-2.24	0.028	*
PSAK	H4 : +	+	6.888	1.84	0.07	**
ROA	-	+	3.853	2.277	0.026	*
SIZE	-/+	-	-2.035	-1.087	0.28	
NEWS	-	+	1.514	1.47	0.146	
KAP	-	+	5.803	1.11	0.27	
PUBLIC	-	-	-5.233	-0.854	0.396	
FOR	+	+	10.338	1.286	0.202	
GOV	+	-	-5.599	-0.954	0.343	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.380		
<i>F-Statistic</i>				5.897		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.						
*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

Nilai F hitung pada model penelitian sebesar 5.897 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa model regresi linear berganda dapat digunakan untuk memprediksi *audit delay* atau bisa dikatakan ada pengaruh secara signifikan antara auditor spesialisasi industri, komite audit, dewan komisaris, penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), profitabilitas, ukuran perusahaan, perubahan laba, reputasi KAP, status bank, bank asing, dan bank pemerintah secara simultan terhadap *audit delay*.

4.8.1.1 Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*

Pada tabel 4.13 terlihat nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel auditor spesialisasi industri sebesar 0.09 (< 0.10), akan tetapi pengaruhnya bersifat positif, sehingga auditor spesialisasi industri tidak terbukti dapat mengurangi *audit delay*. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Auditor Spesialisasi Industri berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*” **ditolak**.

Terdapat beberapa hal yang ditengarai menyebabkan signifikannya spesialis industri auditor. Menurut Owhoso (2002), kelebihan spesialisasi industri auditor memiliki pemahaman atas karakteristik suatu industri secara lebih komprehensif dibandingkan yang bukan spesialis industri auditor, yang diduga dapat memperpendek *audit delay*. Namun demikian, dari hasil pengujian disimpulkan bahwa pada industri perbankan menunjukkan spesialisasi industri berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penyebabnya mungkin adalah karena industri perbankan memiliki regulasi yang ketat, sehingga auditor yang memiliki spesialisasi industri akan sangat berhati-hati untuk menjaga integritasnya dan memberi perlakuan khusus pada industri perbankan. Hal ini membuat proses audit memakan waktu lebih lama.

Penyebab kedua diduga disebabkan auditor spesialisasi industri tidak dapat diidentifikasi secara eksplisit. Penentuan auditor spesialisasi industri juga berbeda-beda menurut berbagai sumber. Menurut Palmrose (1986) dan Dunn dan Mayhew (2004) spesialisasi industri auditor ditentukan dengan dominasi pangsa pasar dan penjualan klien di suatu industri sebagai indikator penentu auditor

spesialis industri, sedangkan menurut Hogan dan Jeter (1999) dan Mayhew dan Wilkins (2002) spesialisasi industri auditor yaitu menggunakan indikator dominasi total aset perusahaan klien. Berbeda dengan Balsam, Krishnan, dan Yang (2003) yang menentukan spesialisasi audit berdasarkan dominasi jumlah klien di suatu industri. Hal ini menimbulkan penentuan yang tidak konsisten atas spesialisasi industri auditor sehingga hasil pengujian bergantung pada penentuan yang digunakan.

Penyebab yang terakhir yaitu diduga bahwa spesialisasi industri auditor pada penelitian ini hanya menghasilkan satu KAP yaitu E&Y sebagai spesialis industri perbankan. Setelah dilakukan perhitungan untuk penentuan spesialisasi industri auditor, terlihat bahwa hanya E&Y yang memiliki minimum 30% pangsa pasar pada suatu industri dan memiliki jumlah total aset perusahaan klien yang paling besar. Padahal disamping menggunakan metode tersebut mungkin saja terdapat spesialis industri auditor lain pada urutan kedua.

Terlihat bahwa variabel dewan komisaris terbukti mempengaruhi *audit delay*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel ukuran perusahaan sebesar 0.008 (< 0.05). Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Efektivitas Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*” **diterima**.

Dalam penelitian ini dewan komisaris terbukti dapat mengurangi *audit delay*. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan proses audit yang dilakukan pihak independen, dewan komisaris sebagai salah satu komponen *corporate governance* memiliki peranan secara *general* terhadap pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris membentuk komite audit sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan yang berkaitan dengan informasi keuangan. Dewan komisaris yang baik akan membentuk komite audit yang kuat. Pengawasan atas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak auditor eksternal merupakan fungsi dari komite audit, sehingga *audit delay* yang terjadi dapat berkurang dengan adanya efektivitas dewan komisaris baik, walaupun tidak memiliki hubungan secara langsung.

Terlihat bahwa variabel komite audit terbukti mempengaruhi *audit delay*. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel komite audit sebesar 0.028 ($< 0,05$). Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Efektifitas Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*” **diterima**.

Komite audit sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang terdapat pada perusahaan perbankan terbukti dapat mengurangi panjangnya *audit delay*. Hal ini diduga karena komite audit telah melakukan tugasnya secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan menjunjung prinsip *corporate governance* yakni transparansi, *fairness*, tanggung jawab, dan akuntabilitas (NCCG,2001). Komite audit memiliki peranan secara langsung dalam memastikan adanya fungsi audit eksternal yang efektif dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : lingkup kerja, efektifitas biaya, independensi, dan obyektifitas dari auditor eksternal.

Selain dari pada itu, diduga penyebab lainnya yaitu dengan adanya efektivitas komite audit yang baik maka informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan memiliki kualitas yang lebih baik. Efektivitas komite audit yang baik menciptakan alur informasi keuangan perusahaan yang efisien sehingga informasi yang disajikan lebih relevan dan reliabel. Dengan adanya hal tersebut auditor menjadi lebih yakin bahwa informasi yang bias baik disebabkan oleh adanya kecurangan ataupun kesalahan pelaporan yang tidak disengaja akan semakin kecil, sehingga auditor mengurangi *Control Risk* yang diyakini, maka auditor tidak terlalu menekankan *substantive test of transaction*. Dengan begitu panjangnya *audit delay* dapat berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Marihot dan Doddy (2007), Veronica dan Bachtiar (2004), dan Wilopo (2004) yang mengaitkan komite audit dengan manajemen laba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit yang terdapat didalam perusahaan dapat mengurangi tindak manipulasi laba.

Nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) sebesar 0.07 (< 0.10), sehingga penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terbukti dapat memperpanjang *audit delay*. Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006)

berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Audit Delay*” **diterima**. Penyebab *audit delay* yang lebih panjang saat penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) adalah karena karakteristik dari PSAK 50/55 yang mengadopsi IFRS lebih menekankan pada *principle base* dan *fair value* jika dibandingkan dengan PSAK 50/55 yang berlaku sebelumnya sehingga membuat risiko audit semakin besar. Oleh karena itu, auditor memerlukan waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaan audit untuk melakukan verifikasi atas penilaian-penilaian akuntan dalam laporan keuangan. Disamping itu juga penerapan PSAK 50/55 sangat kompleks sehingga menuntut tenaga kerja yang kompeten dan sistem informasi yang memadai bagi perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh kepada *timeliness* dari pelaporan informasi keuangan perusahaan.

4.8.1.2 Variabel Kontrol

Pada tabel 4.13, terlihat hanya satu variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu profitabilitas bank (ROA) dengan nilai signifikansi 0.064. Profitabilitas bank berpengaruh positif secara signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000), yang mengatakan bahwa pengaruh profitabilitas adalah negatif terhadap jangka waktu penyampaian laporan keuangan. Namun hasil ini tidak konsisten dengan hasil dari penelitian Saleh (2004) dan Rachmawati (2008) yang mengatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Dapat dilihat untuk variabel lainnya yaitu ukuran bank, perubahan laba, reputasi KAP, status bank, bank asing dan bank pemerintah memiliki nilai signifikansi > 0.10 . Variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini mungkin karena regulasi yang ketat pada industri perbankan membuat variabel-variabel kontrol tersebut menjadi lebih rigid dalam mempengaruhi *audit delay*, sehingga pengaruhnya menjadi tidak signifikan.

4.8.2 Pengaruh Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Hubungannya Auditor Spesialisasi Industri dengan *Audit Delay*

Hasil pengujian regresi linier berganda pada hipotesis 5 dan 6 (H5 dan H6) yang menyatakan pengaruh moderasi dewan komisaris dan komite audit memperkuat pengaruh negatif auditor spesialisasi industri terhadap *audit delay* dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 2

Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			132.197	2.494	0.015	
SPEC	-	+	3.303	0.263	0.794	
DEKOM	-	-	-12.105	-2.673	0.009	*
KOMDIT	-	-	-11.333	-2.274	0.026	*
PSAK	+	+	6.67	1.739	0.086	**
SPEC*DEKOM	H5 : -	+	1.563	0.102	0.919	
SPEC*KOMDIT	H6 : -	+	7.209	0.478	0.634	
ROA	-	+	3.905	2.281	0.025	**
SIZE	-/+	-	-1.895	-0.996	0.323	
NEWS	-	+	1.621	1.537	0.128	
KAP	-	+	5.871	1.108	0.271	
PUBLIC	-	-	-5.586	-0.893	0.375	
FOR	+	+	10.289	1.255	0.213	
GOV	+	-	-6.227	-1.032	0.305	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.367		
<i>F-Statistic</i>				4.922		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.						
*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

Hasil pengujian model 2 menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak terbukti mempengaruhi hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay* secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji *t-statistic* variabel SPEC*DEKOM dan SPEC*KOMDIT masing-masing sebesar 0.919 dan 0.634. Dengan demikian Hipotesis Ha5 dan Ha6 yang masing-masing menyatakan bahwa “dewan komisaris memperkuat pengaruh negatif auditor spesialisasi industri terhadap *audit delay*” dan “komite audit memperkuat pengaruh negatif auditor spesialisasi industri terhadap *audit delay*” **ditolak**.

Hal ini mungkin disebabkan oleh auditor spesialisasi industri akan mengutamakan kualitas audit yang dihasilkan. Disamping itu, dewan komisaris dan komite audit yang efektif juga akan peduli atas kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor eksternal. Dewan komisaris dan komite audit akan memastikan adanya fungsi audit eksternal yang efektif dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain lingkup kerja, efektifitas biaya, independensi, dan obyektifitas dari auditor eksternal. Faktor-faktor tersebut seyogyanya dapat dipenuhi oleh auditor yang memiliki spesialisasi industri. Dengan demikian dewan komisaris dan komite audit memiliki tujuan yang sejalan dengan auditor spesialisasi industri, yaitu mengutamakan kualitas dari pekerjaan audit. Hal ini yang mungkin membuat dewan komisaris dan komite audit tidak memperkuat pengaruh negatif atas hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*. Fitriany (2011) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas komite audit berpengaruh positif langsung terhadap kualitas audit yang dilihat dari sisi prediktabilitas dan *timeliness*. Semakin tinggi kualitas komite audit maka kualitas audit dari sisi prediktabilitas dan *timeliness* juga semakin baik.

4.8.3 Pengaruh Moderasi Auditor Spesialisasi Industri, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Hubungannya Penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) dengan *Audit Delay*

Hasil pengujian regresi linier berganda pada hipotesis 7, 8 dan 9 (H7, H8, dan H9) yang menyatakan pengaruh moderasi auditor spesialisasi industri, dewan

komisaris, dan komite audit memperlemah pengaruh positif dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay* dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Model 3

$\text{AUDLAY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SPEC}_{it} + \beta_2 \text{DEKOM}_{it} + \beta_3 \text{KOMDIT}_{it} + \beta_4 \text{PSAK}_{it} + \beta_5 \text{PSAK} * \text{SPEC}_{it} + \beta_6 \text{PSAK} * \text{DEKOM}_{it} + \beta_7 \text{PSAK} * \text{KOMDIT}_{it} + \beta_8 \text{ROA}_{it} + \beta_9 \text{SIZE}_{it} + \beta_{10} \text{NEWS}_{it} + \beta_{11} \text{KAP}_{it} + \beta_{12} \text{PUBLIC}_{it} + \beta_{13} \text{FOR}_{it} + \beta_{14} \text{GOV}_{it} + \varepsilon_{it}$						
Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			139.207	2.628	0.01	
SPEC	-	+	11.412	1.342	0.184	
DEKOM	-	-	-11.814	-1.975	0.052	*
KOMDIT	-	-	-15.286	-2.49	0.015	*
PSAK	+	+	2.459	0.405	0.686	
PSAK*SPEC	H7 : +/-	-	-2.727	-0.263	0.794	
PSAK*DEKOM	H8 : +/-	-	-1.301	-0.152	0.879	
PSAK*KOMDIT	H9 : +/-	+	10.454	1.218	0.227	
ROA	-	+	3.613	2.101	0.039	**
SIZE	-/+	-	-2.067	-1.09	0.279	
NEWS	-	+	1.299	1.221	0.226	
KAP	-	+	5.825	1.101	0.274	
PUBLIC	-	-	-5.345	-0.862	0.392	
FOR	+	+	9.648	1.185	0.24	
GOV	+	-	-4.899	-0.816	0.417	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.368		
<i>F-Statistic</i>				4.662		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari sama dengan median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.						
*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

Hasil pengujian model 3 menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, dan komite audit tidak terbukti mempengaruhi hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay* secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji *t-statistic* variabel PSAK*SPEC, PSAK*DEKOM, dan PSAK*KOMDIT masing-masing sebesar 0.794; 0.879; dan 0.227.

Dengan demikian Hipotesis Ha7, Ha8 dan Ha9 yang masing-masing menyatakan bahwa “auditor spesialisasi industri memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*”, “dewan komisaris memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*” dan “komite audit memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*” **ditolak**.

Hal ini diduga implementasi dari PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan hal yang baru bagi auditor spesialisasi industri sebagai pihak eksternal maupun komite audit dan dewan komisaris sebagai pihak internal, sehingga auditor spesialisasi industri, komite audit, dan dewan komisaris akan sangat berhati-hati dalam menelaah implementasi PSAK tersebut. Resiko audit yang meningkat membuat auditor membutuhkan waktu yang lebih lama sekalipun auditor tersebut adalah auditor spesialisasi industri. Disamping itu juga, seperti yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, implementasi PSAK 50/55 (revisi 2006) merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan sistem informasi teknologi yang memadai. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh internal perusahaan yang mungkin dapat mempengaruhi *timeliness* dari pelaporan informasi keuangan.

Sama seperti auditor spesialisasi industri, Penyajian informasi yang berkualitas juga menjadi perhatian utama bagi dewan komisaris dan komite audit. Komite audit dan dewan komisaris sebagai mekanisme *corporate governance* juga akan menelaah secara hati-hati apabila ada standar pelaporan keuangan baru yang sangat mempengaruhi kandungan informasi yang akan disajikan. Hal ini diduga menyebabkan efektifitas komite audit dan dewan komisaris tidak mampu memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap *audit delay*.

Tabel 4.16
Ringkasan Hasil Hipotesis

Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			135.497	2.594	0.011	
SPEC	H1 : -	+	10.235	1.715	0.09	**
DEKOM	H2 : -	-	-11.776	-2.706	0.008	*
KOMDIT	H3 : -	-	-10.443	-2.24	0.028	*
PSAK	H4 : +	+	6.888	1.84	0.07	**
SPEC*DEKOM	H5 : -	+	1.563	0.102	0.919	
SPEC*KOMDIT	H6 : -	+	7.209	0.478	0.634	
PSAK*SPEC	H7 : +/-	-	-2.727	-0.263	0.794	
PSAK*DEKOM	H8 : +/-	-	-1.301	-0.152	0.879	
PSAK*KOMDIT	H9 : +/-	+	10.454	1.218	0.227	

SPEC = *dummy* auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan *dummy*, bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan *dummy*, bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = *dummy* penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya

*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%

Tabel 4.16 menunjukkan hasil keseluruhan dari hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Terlihat bahwa auditor spesialisasi industri dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *audit delay*. Kemudian dewan komisaris dan komite audit memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *audit delay*. Terlihat juga bahwa mekanisme *corporate governance* tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh negatif terhadap hubungan auditor spesialisasi industri dengan *audit delay*. Selain itu juga auditor spesialisasi industri dan mekanisme *corporate governance* tidak terbukti dapat memperlambat pengaruh positif terhadap hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dengan *audit delay*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini hipotesis 2,3, dan 4 (H2, H3, dan H4) diterima, sedangkan hipotesis lainnya ditolak.

4.9 Uji Sensitivitas

Penelitian ini melakukan uji sensitivitas untuk melihat konsistensi hasil penelitian pada pengujian utama. Perbedaan pada uji sensitivitas ini terletak pada

penilaian variabel *dummy* untuk efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit dimana sebelumnya angka 1 untuk skor lebih dari sama dengan median menjadi angka 1 untuk skor diatas median. Berikut hasil analisis untuk uji sensitivitas.

4.9.1 Hasil Regresi Uji Sensitivitas

Tabel 4.17

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 1

Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			111.937	1.93	0.057	
SPEC	-	+	10.514	1.708	0.092	**
DEKOM	-	-	-10.149	-2.139	0.036	*
KOMDIT	-	-	-8.714	-1.662	0.101	
PSAK	+	+	6.134	1.595	0.115	
ROA	-	+	3.251	1.875	0.065	**
SIZE	-/+	-	-1.269	-0.612	0.542	
NEWS	-	+	1.521	1.44	0.154	
KAP	-	+	3.034	0.576	0.566	
PUBLIC	-	-	-7.141	-1.127	0.263	
FOR	+	+	13.414	1.628	0.108	
GOV	+	-	-6.492	-1.082	0.283	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.344		
<i>F-Statistic</i>				5.202		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit. *, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

Dari hasil uji sensitivitas model 1, dapat terlihat adanya perubahan jika dibandingkan dengan pengujian utama model 1. Variabel komite audit dan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) menjadi tidak signifikan dengan nilai signifikansi diatas 0.10 yaitu 0.101 dan 0.115. Dengan demikian, uji sensitivitas model 1 ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten bila dibandingkan dengan pengujian utama model 1.

Tabel 4.18

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 2

$\text{AUDLAY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SPEC}_{it} + \beta_2 \text{DEKOM}_{it} + \beta_3 \text{KOMDIT}_{it} + \beta_4 \text{PSAK}_{it} + \beta_5 \text{SPEC} * \text{DEKOM}_{it} + \beta_6 \text{SPEC} * \text{KOMDIT}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{SIZE}_{it} + \beta_9 \text{NEWS}_{it} + \beta_{10} \text{KAP}_{it} + \beta_{11} \text{PUBLIC}_{it} + \beta_{12} \text{FOR}_{it} + \beta_{13} \text{GOV}_{it} + \epsilon_{it}$						
Variabel	Predicted Sign	Actual Sign	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			104.005	1.776	0.08	
SPEC	-	+	4.126	0.39	0.697	
DEKOM	-	-	-9.495	-1.869	0.065	**
KOMDIT	-	-	-11.862	-2.051	0.044	*
PSAK	+	+	6.35	1.644	0.104	
SPEC*DEKOM	-	-	-6.88	-0.488	0.627	
SPEC*KOMDIT	-	+	16.461	1.284	0.203	
ROA	-	+	3.13	1.799	0.076	**
SIZE	-/+	-	-0.986	-0.47	0.64	
NEWS	-	+	1.627	1.533	0.13	
KAP	-	+	3.468	0.654	0.515	
PUBLIC	-	-	-6.954	-1.077	0.285	
FOR	+	+	13.035	1.576	0.119	
GOV	+	-	-6.15	-0.991	0.325	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.342		
<i>F-Statistic</i>				4.517		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.						
*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

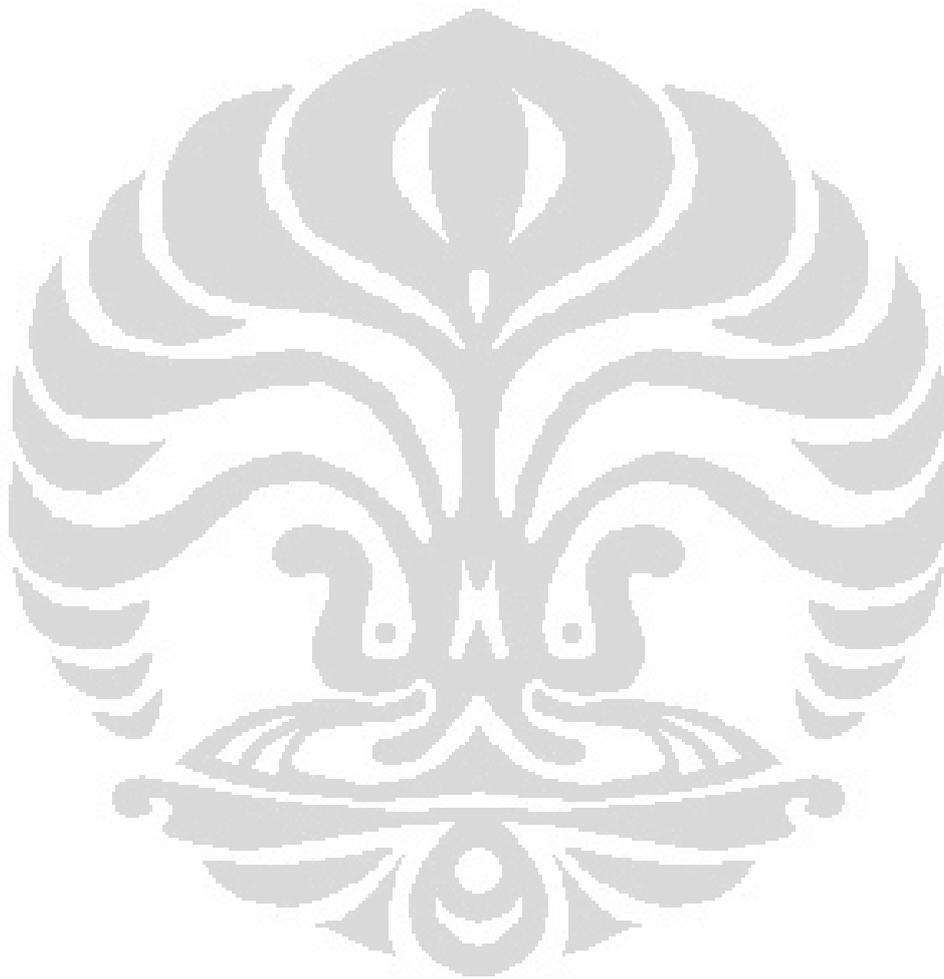
Pada uji sensitivitas model 2, hasil pengujian menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian utama model 2. Pada pengujian sensitivitas model 2, efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak memperkuat pengaruh negatif auditor spesialisasi industri terhadap hubungannya dengan *audit delay*. Dengan demikian, uji sensitivitas model 2 dianggap konsisten dengan pengujian utama model 2.

Tabel 4.19

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Uji Sensitivitas Model 3

$\text{AUDLAY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SPEC}_{it} + \beta_2 \text{DEKOM}_{it} + \beta_3 \text{KOMDIT}_{it} + \beta_4 \text{PSAK}_{it} + \beta_5 \text{PSAK} * \text{SPEC}_{it} + \beta_6 \text{PSAK} * \text{DEKOM}_{it} + \beta_7 \text{PSAK} * \text{KOMDIT}_{it} + \beta_8 \text{ROA}_{it} + \beta_9 \text{SIZE}_{it} + \beta_{10} \text{NEWS}_{it} + \beta_{11} \text{KAP}_{it} + \beta_{12} \text{PUBLIC}_{it} + \beta_{13} \text{FOR}_{it} + \beta_{14} \text{GOV}_{it} + \varepsilon_{it}$						
Variabel	Predicted Sign	Actual Sign	Koefisien	t-Statistic	Sig.	
C			114.779	1.958	0.054	
SPEC	-	+	11.364	1.329	0.188	
DEKOM	-	-	-8.648	-1.316	0.192	
KOMDIT	-	-	-14.955	-2.04	0.045	*
PSAK	+	+	2.997	0.563	0.575	
PSAK*SPEC	+/-	+	-1.897	-0.176	0.861	
PSAK*DEKOM	+/-	+	-2.87	-0.304	0.762	
PSAK*KOMDIT	+/-	+	11.491	1.237	0.22	
ROA	-	+	2.904	1.64	0.105	
SIZE	-/+	-	-1.328	-0.634	0.528	
NEWS	-	+	1.442	1.334	0.186	
KAP	-	+	3.556	0.667	0.507	
PUBLIC	-	-	-6.324	-0.973	0.334	
FOR	+	+	13.687	1.645	0.104	
GOV	+	-	-5.307	-0.861	0.392	
<i>Adjusted R-Squared</i>				0.332		
<i>F-Statistic</i>				4.131		
<i>Sig. (F-Statistic)</i>				0.000		
Keterangan : ROA = <i>Return on Assets</i> , % rasio laba sebelum pajak terhadap total aset; SIZE = ukuran bank; NEWS = perubahan laba bersih tahun t terhadap t-1; KAP = <i>dummy</i> KAP Big-4, bernilai 1 untuk KAP Big-4, 0 apabila sebaliknya; PUBLIC = <i>dummy</i> status bank, bernilai 1 untuk perusahaan publik, 0 apabila sebaliknya; FOR = <i>dummy</i> bank asing, bernilai 1 untuk bank asing, 0 apabila sebaliknya; GOV = <i>dummy</i> bank pemerintah, bernilai 1 apabila bank pemerintah, 0 apabila sebaliknya; SPEC = <i>dummy</i> auditor spesialisasi industri, bernilai 1 untuk auditor spesialisasi industri, apabila sebaliknya; DEKOM = skor efektifitas dewan komisaris yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; KOMDIT = skor efektifitas komite audit yang dijadikan <i>dummy</i> , bernilai 1 jika lebih dari median, 0 apabila sebaliknya; PSAK = <i>dummy</i> penerapan PSAK 50/55, bernilai 1 apabila menerapkan PSAK 50/55, 0 apabila sebaliknya; AUDLAY = jangka waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit.						
*, ** menotasikan tingkat signifikansi pada alpha 5, 10%						

Pada uji sensitivitas model 3, hasil pengujian menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian utama model 3. Pada pengujian sensitivitas model 3, auditor spesialisasi industri, efektifitas dewan komisaris, dan komite audit tidak memperlemah pengaruh positif penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap hubungannya dengan *audit delay*. Dengan demikian, uji sensitivitas model 3 dianggap konsisten dengan pengujian utama model 3.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh auditor spesialisasi industri dan *corporate governance* yaitu dewan komisaris dan komite audit, serta penerapan PSAK 50/55 yang akan digunakan sebagai variabel independen utama dan juga profitabilitas, ukuran bank, perubahan laba, reputasi KAP, status bank, bank asing, dan bank pemerintah sebagai variabel kontrol terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan selama dua tahun berturut-turut, dari 2009 hingga 2010 dan mencakup 89 sampel perusahaan perbankan.

Menggunakan analisis regresi berganda, dimana uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji hipotesis, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata *audit delay* bank sampel di Indonesia sepanjang 2009-2010 tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh BAPEPAM-LK yaitu selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Model penelitian dinyatakan lolos uji asumsi klasik, yakni memenuhi asumsi normalitas, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, maupun autokorelasi. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat pada model penelitian sebesar 38 persen.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi *audit delay* adalah auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, komite audit, penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006), dan profitabilitas. Sementara faktor ukuran bank, perubahan laba, reputasi KAP, status bank, bank asing, dan bank pemerintah tidak berpengaruh.
3. Hasil pengujian dengan pemoderasi pada model 2 menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh negatif dari hubungan auditor spesialisasi industri dan *audit delay* secara signifikan.

4. Hasil pengujian dengan pemoderasi pada model 3 menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri, dewan komisaris, dan komite audit tidak terbukti dapat memperlemah pengaruh positif dari hubungan penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dan *audit delay* secara signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

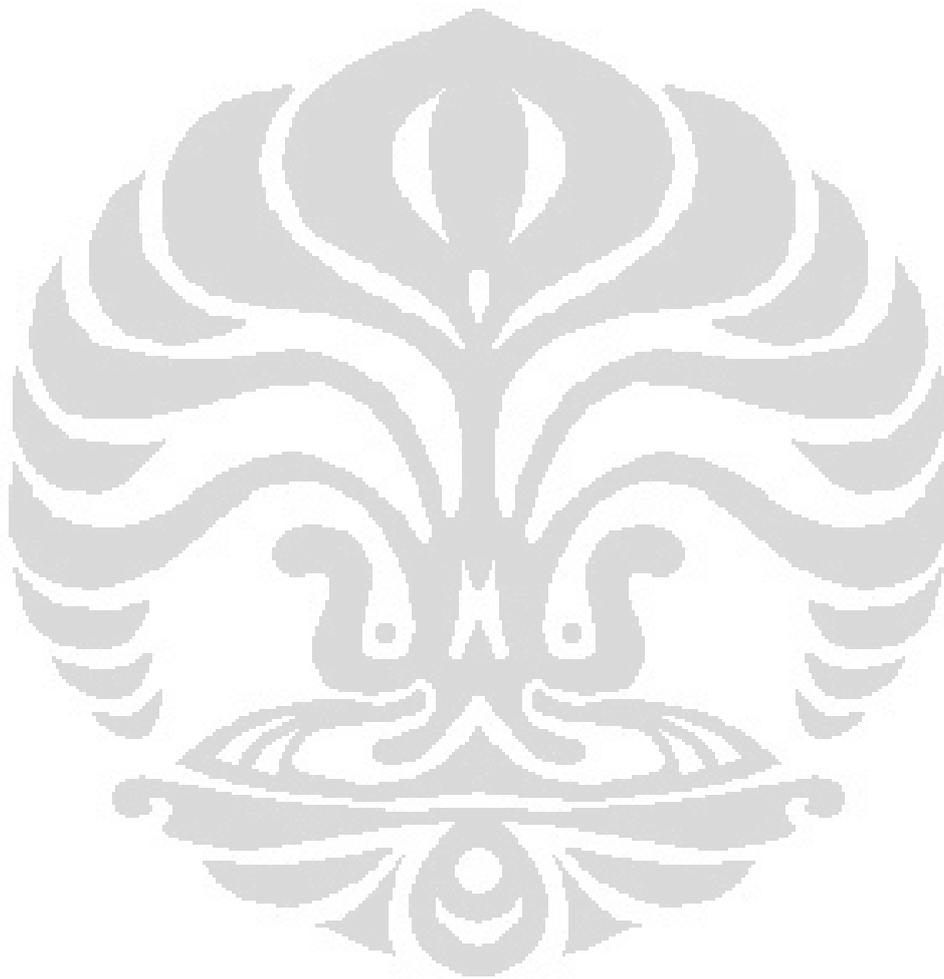
1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit dibanding jumlah proporsi bank umum konvensional secara keseluruhan. Jumlah sampel yang digunakan hanya 49 bank dari 111 bank yang terdaftar pada Bank Indonesia selama tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan ketidaklengkapan informasi keuangan dari data yang dikumpulkan atas bank yang ada di Indonesia.
2. Penelitian dilakukan mengacu pada definisi *audit delay* yang telah ada pada literatur-literatur hasil penelitian sebelumnya, dimana literatur tersebut belum cukup menjelaskan definisi *audit delay* karena tidak memperhitungkan waktu perikatan audit yang sangat mungkin berbeda pada tiap perusahaan sampel per tahunnya.
3. Dikarenakan fokus penelitian pada perusahaan perbankan, maka hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir *audit delay* pada perusahaan industri lainnya di Indonesia sepanjang tahun 2009-2010.
4. Penentuan auditor spesialisasi industri hanya berfokus pada KAP yang memiliki persentase total aset perusahaan klien terbesar, sesuai dengan kriteria Gul, Fung, dan Jaggi (2009), serta apabila KAP tersebut memiliki persentase total aset perusahaan klien minimum sebesar 30% di industri bank umum konvensional (Reichelt dan Wang, 2009). Hal ini mengakibatkan KAP yang mungkin juga merupakan auditor spesialis industri dengan definisi lain pada referensi yang berbeda menjadi teranulir.

5.3 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran-saran kepada peneliti selanjutnya, pihak auditor, perusahaan perbankan, dan regulator antara lain :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode jangka waktu yang lebih lama.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.
3. Kepada auditor, disarankan untuk merencanakan pekerjaan lapangan dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mengingat jumlah klien yang diaudit dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka auditor harus merencanakan dengan seksama agar laporan keuangan auditan yang dihasilkan tepat waktu.
4. Kepada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, disarankan untuk memberikan keleluasaan kepada auditor untuk melakukan pekerjaan lapangan sebelum tanggal penutupan buku. Perusahaan diharapkan dapat membantu auditor dengan memberikan data-data yang diperlukan selama proses pemeriksaan, memberikan jawaban-jawaban yang benar dan wajar atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor sehingga laporan keuangan auditan dapat diterbitkan lebih awal.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap *audit delay*, maka meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu penyelesaian audit bagi auditor spesialisasi industri sangat diperlukan, salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar auditing kepada staf audit dalam rangka peningkatan kemampuan auditor terutama dibidang perbankan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam melakukan proses audit bagi auditor spesialisasi industri. Disamping itu motivasi yang tinggi agar dapat melaksanakan audit lebih singkat dan mengatur jadwal waktu yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan audit lebih cepat juga sangat diperlukan oleh auditor spesialisasi industri.

6. Kepada regulator dalam kaitannya dengan *timeliness*, sebaiknya kebijakan mengenai jangka waktu pelaporan ditinjau kembali mengingat masih ada beberapa bank yang telat untuk melaporkan laporan tahunannya. Mungkin dapat juga ditelaah kembali mengenai hukuman bagi bank yang mengalami keterlambatan pelaporan.



DAFTAR REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. 2006. *Auditing and Assurance Services*. Pearson Prentice Hall.
- Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earning quality. *Auditing: Journal of Practice & Theory*, 22, 71-97.
- Bank Indonesia. 2001. Peraturan Bank Indonesia: Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- _____. 2001. Peraturan Bank Indonesia: Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- _____. 2010. *Laporan Pengawasan Perbankan 2010*. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
- _____. 2011. *Booklet Perbankan Indonesia 2011*. Jakarta. Direktorat Perizinan dan Administrasi Perbankan Bank Indonesia.
- Bastian, Indra & Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawati, D. et al., 2004, "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan," Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.
- Dunn, K. A., & Mayhew, B.W. 2004. Audit firm industry specialization and client disclosure quality. *Review of Accounting Studies*, 9, 35-58.
- Effendi, M. Arief, 2005, "Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 1, No. 1, Jakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2003. *Indonesian Company Law*. Available on-line at www.fcgi.org.id
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York: MC. Graw-Hill Inc. Jakarta: Erlangga

- Gul, F.A., Fung, S.Y.K., & Jaggi, B.. 2009. Earnings Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics* 47, 265–287.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habib, A. & Bhuiyan, U. B. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 32-44.
- Halim, Varianda. 2000. Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*: studi empiris pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (2:1), April, Hal. 63-75.
- Hartanto, Andrian. 2010. *Pengaruh Tenure dan Spesialisasi Audit terhadap Kualitas Laba dengan Pendekatan Nilai Prediksi, Netralitas, Ketepatan Waktu, dan Penyajian Jujur: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007*. Skripsi. Depok. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hermawan, Ancella A. (2009). *Pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga, dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba: Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Disertasi. Depok. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hogan, C.E. dan D.C. Jeter. (1999). Industry specialization by auditors. *Auditing : A Journal of Practice and Theory*, 18: 1, pp. 1-17.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-06/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., dan Warfield, Terry D. (2007). *Akuntansi Intermediate*. Edisi Keduabelas. Jilid Satu. Jakarta : Erlangga.
- Klein, A., 2002, Audit Commite, Board of Director, Characteristics Economics (33), pp. 375-400
- Maletta, M., & Wright, A. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error Characteristics. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 15 (1), 71-86.
- Manurung, Berkah. 2010. Pengaruh diversifikasi perusahaan dan spesialisasi industri auditor terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Departemen Akuntansi: Depok.
- Mayhew, B. W., & Wilkins, M.S. (2003). Audit firm industry specialization as differentiation strategy: Evidence from fees charged to firms going public. *Auditing: A journal of Practice & Theory*, 22, 33-52.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- Monks R., Minow, N., "Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century", Cambridge, Blackwell, 1996.
- Na'im, Ainun. 1999. Nilai informasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan: analisis empirik regulasi informasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (14:2), April, p. 85-99.
- Nasution, Marihot. dan Setiawan, Doddy. (2007). Pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. *SNA X*, 26-28 Juli 2007, (<http://akuntansiku.com>, diakses 5 Februari 2012).

- Owhoso, V. E., Messier, W. F., & Linch, J. G. (2002). Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. *Journal of Accounting Research*. 40(3), 883-900.
- Owusu –Ansah, S. 2000. Timeliness of corporate financial reporting in emerging markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. *Accounting and Business Research*, 241-254.
- Palmrose, Z-V. 1986. Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence. *Journal of Accounting Research* 24, 97-110.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
- Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Rachmawati, Sistya. (2008). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1) : 1-10.
- Respati, Novita W. (2004). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan : Studi empiris di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Maksi*, 4 : Hal 67-79.
- Sam'ani. (2008). *Pengaruh corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004 – 2007*. Thesis. Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Subekti, Imam. dan Widiyanti, Novi W. (2004). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay di Indonesia. *SNA VII*, 2-3 Desember 2004, (<http://akuntansiku.com>, diakses 5 Februari 2012).

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua Belas. Bandung : CV Alfabeta.

Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia PAPI Revisi 2008*. Jakarta. BankIndonesia.

Wirakusuma, Made G. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang waktu penyajian laporan keuangan ke publik : studi empiris mengenai keberadaan divisi internal audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VII Denpasar*, 2-3 Desember 2004.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kriteria Skor Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

a) Dewan komisaris

A. Independensi

1. Jumlah proporsi komisaris independen : semakin tinggi proporsi jumlah komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan obyektifitas dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Menurut peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006 tentang GCG bagi bank umum pada pasal 5 ayat 2, proporsi dewan komisaris independen minimal 50% dari seluruh anggota komisaris. Kriteria penilaian :
Good : apabila jumlah proporsi komisaris independen lebih dari 50%
Fair : apabila jumlah proporsi komisaris independen sebesar 50%
2. Komisaris utama merupakan komisaris independen : komisaris utama memiliki peranan penting dalam menetapkan keputusan akhir dalam rapat dewan komisaris. Apabila komisaris utama adalah komisaris independen maka diharapkan keputusan yang diambil akan lebih obyektif dan tidak memihak untuk kepentingan pihak tertentu. Kriteria penilaian :
Good : apabila komisaris utama merupakan komisaris yang independen
Poor : apabila komisaris utama merupakan komisaris bukan independen
3. Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan definisi independen untuk komisaris independen : definisi independen harus dipahami dengan jelas setiap perusahaan sehingga harus diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai indikator bahwa komisaris independen yang dimiliki perusahaan benar-benar memiliki kriteria independen. Kriteria penilaian :
Good : apabila terdapat pernyataan yang jelas mengenai definisi independen bagi komisaris independen perusahaan, sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh BEI dan BAPEPAM-LK.
Poor : apabila tidak terdapat pernyataan yang jelas mengenai definisi independen bagi komisaris independen perusahaan, sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh BEI dan BAPEPAM-LK.

4. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afliasinya : semakin banyak proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afliasinya maka dapat mengurangi efektifitas peran monitoring dewan komisaris karena cenderung tidak independen. Kriteria penilaian :
Good : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afliasinya tidak lebih dari 30%.
Fair : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afliasinya diantara 30% - 50%.
Poor : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan pemegang saham atau afliasinya diatas 50%.
 5. Lama menjabat sebagai dewan komisaris di perusahaan yang bersangkutan : semakin lama anggota dewan komisaris menjabat pada suatu perusahaan berakibat mengurangi independensi dan obyektifitas dalam menjalankan tugasnya. Kriteria penilaian :
Good : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah sampai dengan 5 tahun.
Fair : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun.
Poor : apabila rata-rata lama menjabat dari anggota dewan komisaris adalah diatas 10 tahun.
- B. Aktivitas
6. Jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan dalam satu tahun : dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris harus mengadakan rapat yang rutin dilakukan oleh semua anggota dewan komisaris sendiri maupun dengan dewan direksi. Menurut pasal 15 ayat 1 peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006 rapat dewan komisaris harus dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. Kriteria penilaian :
Good : apabila dewan komisaris mengadakan rapat sebanyak lebih dari 6 kali dalam setahun.
Fair : apabila dewan komisaris mengadakan rapat sebanyak 4-6 kali dalam setahun.

7. Jumlah tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris selama satu tahun : tingkat kehadiran rapat dewan komisaris dapat menjadi indikator dari keaktifan masing-masing anggota dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya. Menurut pasal 15 ayat 2 pada peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006 rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris paling kurang 2 kali dalam setahun. Kriteria penilaian :
- Good : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota dewan komisaris dalam rapat dewan komisaris selama setahun berjumlah lebih dari 85%.
- Fair : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota dewan komisaris dalam rapat dewan komisaris selama setahun berjumlah antara 75%-85%.
- Poor : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota dewan komisaris dalam rapat dewan komisaris selama setahun berjumlah kurang dari 75%.
8. Dewan komisaris melakukan evaluasi atas laporan keuangan perusahaan : salah satu tugas dewan komisaris adalah mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat menjadi indikator dari kinerja manajemen. Oleh sebab itu dewan komisaris perlu memahami dan mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Kriteria penilaian :
- Good : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris memberikan pernyataan tentang evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan.
- Poor : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris tidak memberikan pernyataan tentang evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan.
9. Dewan komisaris melakukan evaluasi tahunan atas kinerja manajemen : dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga dewan komisaris harus mengevaluasi kinerja manajemen selama tahun berjalan. Kriteria penilaian :
- Good : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris memberikan pernyataan tentang kinerja manajemen.
- Poor : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris tidak memberikan pernyataan tentang kinerja manajemen.

10. Dewan komisaris memberikan penilaian atas kebijakan strategis bank yang disiapkan oleh manajemen. Menurut pasal 9 ayat 3 peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.

Kriteria penilaian :

Good : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris memberikan pernyataan tentang evaluasi atas kebijakan strategis bank yang disiapkan oleh manajemen.

Poor : apabila dalam laporan tahunan perusahaan dewan komisaris tidak memberikan pernyataan tentang evaluasi atas kebijakan strategis bank yang disiapkan oleh manajemen.

C. Size

11. Jumlah Anggota : menurut pasal 4 ayat 1 peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, jumlah anggota dewan komisaris minimal berjumlah 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Kriteria penilaian :

Good : apabila dewan komisaris perusahaan terdiri dari 5-10 orang anggota

Fair : apabila dewan komisaris perusahaan terdiri dari 11-15 orang anggota

Poor : apabila dewan komisaris perusahaan terdiri dari >15 atau <5 orang anggota

D. Kompetensi

12. Jumlah proporsi anggota dewan komisaris memiliki kompetensi pengetahuan dibidang keuangan dan akuntansi : semakin banyak proporsi dewan komisaris yang memiliki kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi maka efektifitas kinerja dewan komisaris dalam melakukan tugasnya semakin baik, terutama pada industri perbankan yang memiliki banyak sekali instrumen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi. Kriteria penilaian :

Good : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan dibidang keuangan atau akuntansi lebih dari 50%.

Fair : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan dibidang keuangan atau akuntansi diantara 30% - 50%.

Poor : apabila jumlah proporsi anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan dibidang keuangan atau akuntansi kurang dari 30%.

13. Jumlah proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perbankan : semakin banyak dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perbankan maka efektifitas dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi bisnis tentang perbankan semakin baik. Kriteria penilaian :

Good : apabila jumlah proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perbankan adalah lebih dari 50%.

Fair : apabila jumlah proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perbankan adalah 30% - 50%.

Poor : apabila jumlah proporsi dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perbankan adalah kurang dari 30%.

14. Rata-rata umur dari anggota dewan komisaris : pada umumnya pengalaman dan kemampuan seseorang dipengaruhi oleh faktor usianya. Kriteria penilaian :

Good : apabila rata-rata usia anggota dewan komisaris adalah diatas 40 tahun.

Fair : apabila rata-rata usia anggota dewan komisaris adalah diantara 30 tahun sampai 40 tahun.

Poor : apabila rata-rata usia anggota dewan komisaris adalah dibawah 30 tahun.

b) Komite audit**A. Aktivitas**

1. Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun : menurut pasal 47 ayat 1 peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, jumlah pelaksanaan rapat komite audit dalam satu tahun diselenggarakan sesuai kebutuhan bank.

Kriteria penilaian :

Good : apabila komite audit mengadakan rapat lebih dari 6 kali dalam satu tahun.

Fair : apabila komite audit mengadakan rapat sebanyak 4 sampai 6 kali dalam satu tahun.

Poor : apabila komite audit mengadakan rapat kurang dari 4 kali dalam satu tahun.

2. Tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit selama satu tahun : tingkat kehadiran rapat komite audit dalam satu tahun mencerminkan keaktifan komite audit dalam melaksanakan fungsinya.

Kriteria penilaian :

Good : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite audit selama setahun berjumlah lebih dari 80%.

Fair : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite audit selama setahun berjumlah antara 70% - 80%.

Poor : apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite audit selama setahun berjumlah kurang dari 70%.

3. Fungsi komite audit untuk memastikan adanya fungsi audit eksternal yang efektif dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : lingkup kerja, efektifitas biaya, independensi, dan obyektifitas dari auditor eksternal. Kriteria penilaian :

Good : apabila komite audit melakukan evaluasi auditor eksternal atas semua faktor yang disebutkan.

Fair : apabila komite audit melakukan evaluasi auditor eksternal berdasarkan hanya sebagian faktor yang disebutkan.

Poor : apabila komite audit tidak melakukan evaluasi auditor eksternal berdasarkan faktor yang disebutkan.

B. Jumlah Anggota

4. Jumlah anggota komite audit : jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi efektifitas fungsi komite audit. Berdasarkan ketentuan BEI dan Bapepam LK, jumlah anggota komite audit suatu perusahaan minimum adalah 3 orang. Kriteria penilaian :

Good : apabila jumlah anggota komite audit lebih dari 3 orang.

Fair : apabila jumlah komite audit adalah 3 orang.

Poor : apabila jumlah anggota komite audit kurang dari 3 orang.

C. Kompetensi

5. Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi : menurut pasal 38 ayat 1 poin (b) peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Kriteria penilaian :

Good : apabila jumlah anggota komite audit yang memilki latar belakang akuntansi lebih dari 1 orang.

Fair : apabila jumlah anggota komite audit yang memilki latar belakang akuntansi 1 orang.

Poor : apabila tidak satupun anggota komite audit yang memilki latar belakang akuntansi.

6. Rata-rata umur anggota komite audit : pada umumnya, kompetensi seseorang dipengaruhi oleh usianya. Kriteria penilaian menggunakan rata-rata umur anggota komite audit :

Good : apabila rata-rata usia anggota komite audit adalah diatas 40 tahun.

Fair : apabila rata-rata usia anggota komite audit adalah diantara 30 tahun sampai 40 tahun.

Poor : apabila rata-rata usia anggota komite audit adalah dibawah 30 tahun.

7. Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang perbankan : menurut pasal 38 ayat 1 poin (c) peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang

pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Kriteria penilaian :

Good : apabila jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang perbankan lebih dari 1 orang.

Fair : apabila jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang perbankan 1 orang.

Poor : apabila tidak satupun anggota komite audit yang memiliki latar belakang perbankan.

D. Independensi

8. Jumlah persentase komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit : menurut pasal 38 ayat 4 peraturan Bank Indonesia no 8/4/PBI/2006, komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling kurang 51% dari jumlah anggota komite audit. Kriteria penilaian :

Good : apabila persentase komisaris independen dan pihak independen \geq 51%

Poor : apabila persentase komisaris independen dan pihak independen $<$ 51%

Lampiran 2 : Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	89	-5.68	4.48	1.3961	1.24008
SIZE	89	27.46	33.74	30.1909	1.64054
NEWS	89	-1.09	9.94	.8093	1.92660
KAP	89	.00	1.00	.5618	.49898
PUBLIC	89	.00	1.00	.6292	.48575
PSAK	89	.00	1.00	.5056	.50280
FOR	89	.00	1.00	.1236	.33098
GOV	89	.00	1.00	.2697	.44630
SPEC	89	.00	1.00	.1798	.38618
KOMDIT	89	.00	1.00	.5506	.50026
DEKOM	89	.00	1.00	.5169	.50255
AUDLAY	89	26.00	120.00	73.8764	21.91866
Valid N (listwise)	89				

Lampiran 3 : Hasil Output SPSS 16.0 Model 1 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.676 ^a	.457	.380	17.26270	.457	5.897	11	77	.000	1.896

a. Predictors: (Constant), DEKOM, PSAK, NEWS, ROA, KAP, GOV, PUBLIC, SPEC, KOMDIT, FOR, SIZE

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS 16.0 Model 2 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.679 ^a	.460	.367	17.44092	.460	4.922	13	75	.000	1.907

a. Predictors: (Constant), SPEC*DEKOM, ROA, PSAK, FOR, NEWS, KOMDIT, GOV, DEKOM, KAP, PUBLIC, SIZE, SPEC, SPEC*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 5 : Hasil Output SPSS 16.0 Model 3 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.685 ^a	.469	.368	17.42294	.469	4.662	14	74	.000	1.916

a. Predictors: (Constant), PSAK*SPEC, FOR, ROA, NEWS, KOMDIT, PSAK, GOV, DEKOM, KAP, PUBLIC, SIZE, SPEC, PSAK*DEKOM, PSAK*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 6 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 1**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19331.573	11	1757.416	5.897	.000 ^a
	Residual	22946.067	77	298.001		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), DEKOM, PSAK, NEWS, ROA, KAP, GOV, PUBLIC, SPEC, KOMDIT, FOR, SIZE

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 7 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 2**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19463.701	13	1497.208	4.922	.000 ^a
	Residual	22813.939	75	304.186		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), SPEC*DEKOM, ROA, PSAK, FOR, NEWS, KOMDIT, GOV, DEKOM, KAP, PUBLIC, SIZE, SPEC, SPEC*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 8 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Model 3**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19814.276	14	1415.305	4.662	.000 ^a
	Residual	22463.364	74	303.559		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), PSAK*SPEC, FOR, ROA, NEWS, KOMDIT, PSAK, GOV, DEKOM, KAP, PUBLIC, SIZE, SPEC, PSAK*DEKOM, PSAK*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 9 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinieritas Model 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	135.497	52.231		2.594	.011		
	ROA	3.853	1.692	.218	2.277	.026	.769	1.300
	SIZE	-2.035	1.872	-.152	-1.087	.280	.359	2.784
	NEWS	1.514	1.030	.133	1.470	.146	.860	1.163
	KAP	5.803	5.226	.132	1.110	.270	.498	2.008
	PUBLIC	-5.233	6.127	-.116	-.854	.396	.382	2.616
	PSAK	6.888	3.743	.158	1.840	.070	.956	1.046
	FOR	10.338	8.036	.156	1.286	.202	.479	2.089
	GOV	-5.599	5.871	-.114	-.954	.343	.493	2.028
	SPEC	10.235	5.969	.180	1.715	.090	.637	1.569
	KOMDIT	-10.443	4.661	-.238	-2.240	.028	.623	1.606
	DEKOM	-11.776	4.351	-.270	-2.706	.008	.708	1.412

a. Dependent Variable: AUDLAY

Lampiran 10 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinieritas Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	132.197	53.008		2.494	.015		
	ROA	3.905	1.712	.221	2.281	.025	.767	1.304
	SIZE	-1.895	1.903	-.142	-.996	.323	.355	2.819
	NEWS	1.621	1.055	.143	1.537	.128	.837	1.195
	KAP	5.871	5.298	.134	1.108	.271	.495	2.022
	PUBLIC	-5.586	6.254	-.124	-.893	.375	.375	2.670
	PSAK	6.670	3.837	.153	1.739	.086	.929	1.077
	FOR	10.289	8.197	.155	1.255	.213	.470	2.129
	GOV	-6.227	6.031	-.127	-1.032	.305	.477	2.096
	SPEC	3.303	12.574	.058	.263	.794	.147	6.821
	KOMDIT	-11.333	4.983	-.259	-2.274	.026	.556	1.798
	DEKOM	-12.105	4.528	-.278	-2.673	.009	.667	1.498
	SPEC*KOMDIT	7.209	15.092	.117	.478	.634	.120	8.312
	SPEC*DEKOM	1.563	15.325	.025	.102	.919	.117	8.571

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 11 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinieritas Model 3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	139.207	52.973		2.628	.010		
	ROA	3.613	1.720	.204	2.101	.039	.758	1.318
	SIZE	-2.067	1.896	-.155	-1.090	.279	.357	2.804
	NEWS	1.299	1.064	.114	1.221	.226	.821	1.217
	KAP	5.825	5.289	.133	1.101	.274	.495	2.019
	PUBLIC	-5.345	6.201	-.118	-.862	.392	.380	2.630
	PSAK	2.459	6.067	.056	.405	.686	.371	2.698
	FOR	9.648	8.142	.146	1.185	.240	.475	2.105
	GOV	-4.899	6.000	-.100	-.816	.417	.481	2.079
	SPEC	11.412	8.503	.201	1.342	.184	.320	3.126
	KOMDIT	-15.286	6.139	-.349	-2.490	.015	.366	2.734
	DEKOM	-11.814	5.981	-.271	-1.975	.052	.382	2.619
	PSAK*KOMDIT	10.454	8.580	.218	1.218	.227	.224	4.463
	PSAK*DEKOM	-1.301	8.534	-.026	-.152	.879	.238	4.206
	PSAK*SPEC	-2.727	10.385	-.038	-.263	.794	.348	2.874

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 12 : Hasil Output SPSS 16.0 *Pearson Correlation*

		Correlations											
		AUDIT DELAY	ROA	SIZE	NEWS	KAP	PUBLIC	PSAK	FOR	GOV	SPEC	KOMDIT	DEKOM
Pearson Correlation	AUDIT DELAY	1.000	.084	-.307	.266	.036	-.310	.147	.453	-.206	.024	-.359	-.404
	ROA	.084	1.000	.133	-.116	.058	-.267	.000	-.024	.348	-.014	.174	.186
	SIZE	-.307	.133	1.000	-.020	.525	.435	.083	-.245	.287	.468	.542	.361
	NEWS	.266	-.116	-.020	1.000	.103	-.044	.099	.237	-.135	.219	-.010	-.099
	KAP	.036	.058	.525	.103	1.000	.213	.033	.194	-.127	.413	.386	.188
	PUBLIC	-.310	-.267	.435	-.044	.213	1.000	.125	-.489	-.267	.178	.195	.189
	PSAK	.147	.000	.083	.099	.033	.125	1.000	.030	-.057	.053	.055	.033
	FOR	.453	-.024	-.245	.237	.194	-.489	.030	1.000	-.228	.002	-.141	-.320
	GOV	-.206	.348	.287	-.135	-.127	-.267	-.057	-.228	1.000	.177	.244	.182
	SPEC	.024	-.014	.468	.219	.413	.178	.053	.002	.177	1.000	.247	.277
	KOMDIT	-.359	.174	.542	-.010	.386	.195	.055	-.141	.244	.247	1.000	.392
	DEKOM	-.404	.186	.361	-.099	.188	.189	.033	-.320	.182	.277	.392	1.000
Sig. (1-tailed)	AUDIT DELAY	.	.218	.002	.006	.371	.002	.085	.000	.027	.411	.000	.000
	ROA	.218	.	.108	.139	.294	.006	.499	.411	.000	.449	.052	.041
	SIZE	.002	.108	.	.427	.000	.000	.221	.010	.003	.000	.000	.000
	NEWS	.006	.139	.427	.	.169	.340	.178	.013	.104	.020	.464	.177

	KAP	.371	.294	.000	.169	.023	.381	.034	.118	.000	.000	.039
	PUBLIC	.002	.006	.000	.340	.023	.122	.000	.006	.048	.034	.038
	PSAK	.085	.499	.221	.178	.381	.122	.390	.296	.310	.303	.378
	FOR	.000	.411	.010	.013	.034	.000	.390	.016	.493	.094	.001
	GOV	.027	.000	.003	.104	.118	.006	.296	.016	.048	.011	.044
	SPEC	.411	.449	.000	.020	.000	.048	.310	.493	.048	.010	.004
	KOMDIT	.000	.052	.000	.464	.000	.034	.303	.094	.011	.010	.000
	DEKOM	.000	.041	.000	.177	.039	.038	.378	.001	.044	.004	.000
N	AUDIT DELAY	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	ROA	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	SIZE	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	NEWS	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	KAP	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	PUBLIC	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	PSAK	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	FOR	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	GOV	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	SPEC	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	KOMDIT	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89
	DEKOM	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89	.89

Lanjutan

Lampiran 13 : Daftar Bank Sampel

No	Nama Bank	Klasifikasi Bank (per Desember 2010)	
1	Bank Mandiri Tbk.	Bank Persero	
2	Bank Mutiara		
3	Bank Negara Indonesia Tbk.		
4	Bank Rakyat Indonesia Tbk.		
5	Bank Tabungan Negara Tbk.		
6	Bank Agroniaga Tbk.	BUSN Devisa	
7	Bank Artha Graha Internasional Tbk.		
8	Bank Bukopin Tbk.		
9	Bank Bumi Artha Tbk.		
10	Bank Capital Indonesia Tbk.		
11	Bank Central Asia Tbk.		
12	Bank Danamon Indonesia Tbk.		
13	Bank Ekonomi Raharja Tbk.		
14	Bank Eksekutif Internasional		
15	Bank Ganesha		
16	Bank ICB Bumiputera Tbk.		
17	Bank International Indonesia Tbk.		
18	Bank Kesawan Tbk.		
19	Bank Mayapada International Tbk.		
20	Bank Mega Tbk.		
21	Bank Niaga		
22	Bank NISP		
23	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.		
24	Bank Panin		
25	Bank Permata Tbk.		
26	Bank Saudara		
27	Bank SBI Indonesia		
28	Bank Sinarmas Tbk.		
29	Bank Swadesi Tbk.		
30	Bank UOB Indonesia		
31	Bank Windu Kentjana International Tbk.		
32	Bank Ina		BUSN non-Devisa
33	Bank Jasa Jakarta		
34	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.		
35	Bank Victoria International Tbk.		
36	Bank DKI		Bank Pembangunan Daerah
37	Bank Nagari		
38	Bank Nusa Tenggara Barat		

39	Bank Riau Kepri	
40	BPD Bali	
41	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	
42	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	
43	BPD Jawa Tengah	
44	Bank Chinatrust Indonesia	Bank Campuran
45	Bank Commonwealth	
46	Bank KEB Indonesia	
47	Bank Resona Perdania	
48	Bank Hana	Bank Asing
49	Bank Rabobank	

Lanjutan

Lampiran 14 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinieritas Uji Sensitifitas Model 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	111.937	57.989		1.930	.057		
	ROA	3.251	1.733	.184	1.875	.065	.775	1.291
	SIZE	-1.269	2.074	-.095	-.612	.542	.309	3.234
	NEWS	1.521	1.056	.134	1.440	.154	.865	1.157
	KAP	3.034	5.267	.069	.576	.566	.518	1.929
	PUBLIC	-7.141	6.338	-.158	-1.127	.263	.378	2.648
	PSAK	6.134	3.845	.141	1.595	.115	.958	1.044
	FOR	13.414	8.239	.203	1.628	.108	.481	2.078
	GOV	-6.492	5.999	-.132	-1.082	.283	.499	2.003
	SPEC	10.514	6.155	.185	1.708	.092	.634	1.579
	KOMDIT	-8.714	5.243	-.196	-1.662	.101	.534	1.871
	DEKOM	-10.149	4.745	-.229	-2.139	.036	.653	1.532

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 15 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitifitas Model 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18023.760	11	1638.524	5.202	.000 ^a
	Residual	24253.880	77	314.985		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), DEKOM, PSAK, NEWS, PUBLIC, KAP, ROA, GOV, SPEC, KOMDIT, FOR, SIZE

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 16 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitifitas Model 1 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.653 ^a	.426	.344	17.74783	.426	5.202	11	77	.000	1.723

a. Predictors: (Constant), DEKOM, PSAK, NEWS, PUBLIC, KAP, ROA, GOV, SPEC, KOMDIT, FOR, SIZE

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 17 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Uji Sensitifitas Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	104.005	58.560		1.776	.080		
	ROA	3.130	1.739	.177	1.799	.076	.772	1.295
	SIZE	-.986	2.098	-.074	-.470	.640	.303	3.298
	NEWS	1.627	1.061	.143	1.533	.130	.860	1.163
	KAP	3.468	5.298	.079	.654	.515	.514	1.945
	PUBLIC	-6.954	6.458	-.154	-1.077	.285	.365	2.739
	PSAK	6.350	3.862	.146	1.644	.104	.953	1.050
	FOR	13.035	8.270	.197	1.576	.119	.479	2.086
	GOV	-6.150	6.208	-.125	-.991	.325	.468	2.137
	SPEC	4.126	10.571	.073	.390	.697	.216	4.638
	KOMDIT	-11.862	5.783	-.267	-2.051	.044	.441	2.268
	DEKOM	-9.495	5.080	-.214	-1.869	.065	.572	1.750
	SPEC*KOM	16.461	12.821	.249	1.284	.203	.200	5.012
	DIT							
	SPEC*DEKO	-6.880	14.085	-.108	-.488	.627	.153	6.515
	M							

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 18 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitifitas Model 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18565.034	13	1428.080	4.517	.000 ^a
	Residual	23712.607	75	316.168		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), SPEC*DEKOM, ROA, PSAK, FOR, NEWS, KOMDIT, KAP, GOV, DEKOM, PUBLIC, SIZE, SPEC, SPEC*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 19 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitifitas Model 2 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.663 ^a	.439	.342	17.78112	.439	4.517	13	75	.000	1.788

a. Predictors: (Constant), SPEC*DEKOM, ROA, PSAK, FOR, NEWS, KOMDIT, KAP, GOV, DEKOM, PUBLIC, SIZE, SPEC, SPEC*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 20 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji t dan Uji Multikolinearitas Uji Sensitifitas Model 3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	114.779	58.634		1.958	.054		
	ROA	2.904	1.771	.164	1.640	.105	.756	1.323
	SIZE	-1.328	2.096	-.099	-.634	.528	.308	3.244
	NEWS	1.442	1.081	.127	1.334	.186	.840	1.191
	KAP	3.556	5.332	.081	.667	.507	.515	1.942
	PUBLIC	-6.324	6.497	-.140	-.973	.334	.366	2.733
	PSAK	2.997	5.322	.069	.563	.575	.509	1.965
	FOR	13.687	8.322	.207	1.645	.104	.480	2.082
	GOV	-5.307	6.163	-.108	-.861	.392	.482	2.076
	SPEC	11.364	8.553	.200	1.329	.188	.334	2.993
	KOMDIT	-14.955	7.333	-.337	-2.040	.045	.278	3.594
	DEKOM	-8.648	6.570	-.195	-1.316	.192	.347	2.885
	PSAK*KOMDIT	11.491	9.287	.216	1.237	.220	.249	4.019
	PSAK*DEKOM	-2.870	9.451	-.053	-.304	.762	.250	4.000
	PSAK*SPEC	-1.897	10.772	-.026	-.176	.861	.342	2.927

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 21 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Anova Uji Sensitifitas Model 3**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18546.222	14	1324.730	4.131	.000 ^a
	Residual	23731.419	74	320.695		
	Total	42277.640	88			

a. Predictors: (Constant), PSAK*SPEC, FOR, ROA, KOMDIT, NEWS, PSAK, KAP, GOV, DEKOM, PUBLIC, SPEC, PSAK*DEKOM, SIZE, PSAK*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 22 : Hasil Output SPSS 16.0 Uji Sensitifitas Model 3 (Uji Autokorelasi dan Determinasi)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.662 ^a	.439	.332	17.90795	.439	4.131	14	74	.000	1.733

a. Predictors: (Constant), PSAK*SPEC, FOR, ROA, KOMDIT, NEWS, PSAK, KAP, GOV, DEKOM, PUBLIC, SPEC, PSAK*DEKOM, SIZE, PSAK*KOMDIT

b. Dependent Variable: AUDIT DELAY

Lampiran 23 : Statistik Deskriptif Item Skor Efektifitas Dewan Komisaris

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
q1	89	1.00	3.00	2.5056	.52492
q2	89	1.00	3.00	1.4944	.86765
q3	89	1.00	3.00	2.2584	.97150
q4	89	1.00	3.00	2.8090	.44915
q5	89	1.00	3.00	2.6742	.53884
q6	89	1.00	3.00	2.6517	.52443
q7	89	1.00	3.00	2.4944	.75564
q8	89	1.00	3.00	2.4831	.88050
q9	89	1.00	3.00	2.6854	.73230
q10	89	1.00	3.00	2.2360	.97727
q11	89	1.00	3.00	1.8315	.99128
q12	89	1.00	3.00	2.6629	.62055
q13	89	1.00	3.00	2.6404	.64398
q14	89	3.00	3.00	3.0000	.00000
Valid N (listwise)	89				

Lampiran 24 : Statistik Deskriptif Item Skor Efektifitas Komite Audit

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
q1	89	1.00	3.00	2.5730	.61952
q2	89	1.00	3.00	2.6966	.62893
q3	89	1.00	2.00	1.2584	.44025
q4	89	1.00	3.00	2.4494	.54379
q5	89	1.00	3.00	2.4831	.65907
q6	89	3.00	3.00	3.0000	.00000
q7	89	1.00	3.00	2.5506	.62179
q8	89	1.00	3.00	2.9101	.41671
Valid N (listwise)	89				